NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DAN ISRAEL DI TAHUN 2020 PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA HAMMAD BIN ISA AL-KHALIFA

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

VIKI SYAHRIJAL

18323222

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DAN ISRAEL DI TAHUN 2020 PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA HAMMAD BIN ISA AL-KHALIFA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

VIKI SYAHRIJAL

18323222

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DAN ISRAEL DI TAHUN 2020 PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA HAMMAD BIN ISA AL-KHALIFA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Nama Ketua Prodi

(Hangga Fathana S.IP ., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Wahyu Arif Raharjo, S.I.P ., M.I.R.	
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P ., M.A.	
3. Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

6 April 2022,



Viki Syahrijal

DAFTAR ISI

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DAN ISRAEL DI TAHUN 2020 PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA HAMMAD BIN ISA AL-KHALIFA i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR vii

DAFTAR SINGKATAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 1**I.2** 4**I.3** 4**I.4** 4**I.5** 5**I.6** 9**I.7** 12**I.8** 12*I.8.1* 12*I.8.2* 13*I.8.3* 13*I.8.4* 14**I.9** 14**BAB II** 16

DASAR KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAHRAIN 16

2. 1 162.1.1 162.1.2 172.1.3 Pengaruh Politik Domestik dan Rezim terhadap Politik Luar Negeri 19

2.1.4 Lingkaran Politik Luar Negeri Bahrain 21

2.2 222.2.1 Sejarah Hubungan Bahrain-Israel 22

2.2.2 Bahrain-Israel dan Negara-negara Teluk 27

2. 3 292.3.1 Intervensi Amerika Serikat 29

2.3.2 Hubungan Amerika Serikat dan Iran 32

2.4 32**BAB III** 36

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAHRAIN DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DAN ISRAEL 36

3.1 373.1.1 Kondisi Domestik Bahrain 36

3.1.2 Kondisi Ekonomi dan Militer 38

3.1.3 Konteks Internasional 44

3.2 47**3.3** 523.3.1 Respon Domestik/Regional Bahrain 53

3.3.2 54**BAB IV** 58

PENUTUP 58

4.1 58**4.2** 60**DAFTAR PUSTAKA** 61

Lampiran 1. Document Abraham Accord 66

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR

Tabel 1. Hubungan Bahrain dan Israel 26
Tabel 2. Pernyataan dari Policy Influencer 40

DAFTAR SINGKATAN

AS	: *Amerika Serikat*
FIFA	: *Federation Internationale de Football Association*
GCC	: *Gulf Cooperation Council*
GDP	: *Gross Domestic Product*
IRGC	: *Islamic Revolutionary Guard Corps*
ISMC	: *International Security Maritime Construck*
MEE	: *Middle East Eye*
NGO	: *Non Governmental Organization*
PLO	: *Palestine Liberation Organization*
PBB	: *Perserikatan Bangsa-Bangsa*
UEA	: *Uni Emirat Arab*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tanggal 11 September 2020, Bahrain secara resmi menyatakan bahwa negaranya telah sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang memfasilitasi dibukanya hubungan diplomatik antar kedua negara ini. Presiden AS Donald Trump memimpin langsung penandatanganan normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel yang dilaksanakan di Gedung Putih, Washington. Bahrain menjadi negara keempat yang melakukan normalisasi dengan Israel setelah sebelumnya Yordania, Mesir dan Uni Emirat Arab sepakat untuk melakukan normalisasi dengan Israel (Ward, 2020). Melalui Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mengatakan dengan dibukanya hubungan penuh oleh Bahrain ini menandai awal perdamaian dan kemajuan bagi Timur Tengah. Sedangkan Palestina yang telah lama berkonflik dengan Israel mengatakan bahwa normalisasi Bahrain dan Israel sebagai pengkhianatan baru dari negara Arab terhadap Palestina. Palestina menganggap bahwa hal ini semakin mempersulit mereka untuk menentukan nasib negaranya sendiri dan membuat Palestina terisolasi dibawah kerangka baru yang dinahkodai oleh Donald Trump.

Normalisasi dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan beberapa pihak yang sebelumnya memiliki hubungan abnormal untuk mengurangi ketegangan atau gesekan, sampai kepada promosi hubungan yang lebih baik dan membangun hubungan diplomatik. Adanya proses normalisasi berarti karena sebelumnya terdapat hubungan yang tidak normal bahkan adanya ketegangan atau permusuhan

antara kedua belah pihak. Normalisasi dilihat sebagai proses untuk mengetahui adanya ketegangan atau ancaman sehingga memerlukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti promosi peningkatan hubungan atau menyelesaikan seluruh atau sebagian dari sumber ketegangan (Barston, 2013).

Para analis politik di Timur Tengah mengatakan bahwa bergabungnya beberapa negara Arab dengan Israel tidak lepas dari pengaruh AS. Bahrain dan AS sebelumnya telah memiliki hubungan yang baik ketika akan dibukanya perdagangan bebas oleh AS jika Bahrain menghentikan boikotnya kepada Israel (Al-Jazeera, 2020). Pada bulan Januari 2020 Trump mempresentasikan rencananya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah dengan tujuan untuk mengakhiri konflik Palestina dan Israel. Salah satu cara Trump untuk merealisasikan rencananya tersebut adalah dengan menarik beberapa negara Arab untuk membuka kerjasama dengan Israel. Selain itu AS dan Israel memiliki rencana untuk menggantikan konflik Arab-Israel dengan konflik Arab-Iran. Selama insiden Israel-Iran pada bulan Mei 2018, pemerintahan Bahrain dan beberapa negara Arab lainya berada di pihak Israel karena untuk mengantisipasi pengaruh Iran yang akan semakin membesar. Pemerintahan Bahrain berada pada posisi yang anti-Iran. Hal ini karena mereka menganggap bahwa rencana Iran mengembangkan tenaga nuklir adalah agar menjadi hegemon yang kuat di wilayah Arab. Pada bulan Juni 2019, Bahrain menjadi tuan rumah lokakarya “Damai untuk Kesejahteraan” yang mana pada lokakarya tersebut Presiden AS Donald Trump mempresentasikan rencana perdamaian di Timur Tengah yang digagasnya. Kemudian pada 13 Agustus 2020 ketika Trump mengumumkan bahwa UAE akan melakukan normalisasi dengan

Israel, Bahrain mendukung rencana ini dengan mengizinkan penerbangan pesawat dari dan ke Israel yang melewati wilayah udaranya (Lamarque, 2020).

Dibukanya hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel mendapat banyak reaksi dari dalam dan luar negeri terutama dari Palestina sendiri. Satu bulan sebelum penandatanganan itu disepakati, Bahrain telah berkomitmen untuk membantu pembentukan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara. Bahkan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa menolak dorongan pemerintah AS yang meminta negara-negara Arab membuka hubungan dengan Israel. Kepemimpinan Palestina mengutuk perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina atau *Palestine Liberation Organization* (PLO), yang berada di Ramallah menyebut normalisasi itu sebagai tikaman berbahaya bagi perjuangan Palestina. Dan di Gaza, Hazem Qassem sebagai juru bicara Hamas mengatakan keputusan Bahrain untuk menormalisasi hubungan dengan Israel merupakan kerugian besar bagi rakyat Palestina (Al-Jazeera, 2020).

Meskipun sebelumnya Bahrain sebagai negara yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina, kini Bahrain telah menyepakati hubungan kerjasama secara utuh dengan Israel. Raja Hamad bin Isa Al-khalifa mengatakan meskipun telah membuka kerjasama dengan Israel negaranya akan tetap mendukung Palestina, karena menurutnya kesepakatan ini merupakan langkah yang komprehensif untuk menuju perdamain di Timur tengah. Menarik kemudian untuk dibahas mengapa muncul kesepakatan normalisasi antara Bahrain dan Israel, serta bagaimana nasib Palestina dalam kesepakatan ini. Kajian ini mencoba membahas terjadinya normalisasi antara Bahrain dan Israel yang penting untuk diangkat karena terkait

dengan prospek stabilitas keamanan di Timur Tengah dan tingkat global. Pada intinya kajian ini akan menguraikan apa yang melatar belakangi Bahrain untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan keuntungan apa yang didapat oleh Bahrain setelahnya.

I.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam tentang normalisasi hubungan diplomatik Bahrain dan Israel pada masa pemerintahan Raja Hamad Bin Isa Al-Khalifa. Maka fokus utama yang menjadi pertanyaan penelitian adalah *"Mengapa di tahun 2020 pada masa pemerintahan Raja Hamad Bin Isa Al-Khalifa Bahrain melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ?"*

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan Bahrain melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel terutama pada masa pemerintahan Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa di tengah-tengah panasnya konflik negara-negara Timur Tengah.

I.4 Cakupan penelitian

Fokus skripsi ini adalah analisis normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain dan Israel, khususnya di tahun 2020 saat terjadinya normalisasi tersebut dibawah pemerintahan Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa. Alasan penulis mengambil dan membatasi penelitian normalisasi antara Bahrain dan Israel di tahun 2020 yaitu saat pemerintahan Raja Hamad bin Isa Al-khalifa karena pada masa pemerintahannya normalisasi ini resmi dideklarasikan. Selain itu, alasan penulis mengambil masa pemerintahan Raja Hamad bin Isa Al-khalifa adalah karena raja Bahrain ini

sebelumnya selalu mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Kemudian setelah Hamad mengambil kebijakan untuk membuka kerjasama dengan Israel banyak anggapan bahwa normalisasi ini sebagai pengkhianatan besar yang dilakukan oleh Bahrain terhadap Israel.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dibukanya hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel mendapat banyak reaksi dari dunia internasional terutama dari negara-negara Arab yang mengecam kebijakan pemerintahan Bahrain tersebut. Dalam kajian pustaka ini peneliti menemukan beberapa literatur dan karya ilmiah mengenai normalisasi Bahrain dan Israel pada masa pemerintahan Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian ini. Kajian pustaka yang dicantumkan berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Yang pertama, dalam tulisan Itamar Rabinovich pada karya ilmiahnya yang berjudul *Israel and The Changing Middle East.* Dalam tulisan ini disebutkan bahwa politik regional di Timur Tengah terus mengalami gejolak. Konflik Arab dan Israel terus berlanjut bersamaan dengan perebutan wilayah yang terjadi antara Palestina dan Israel. Sebagai kawasan dengan mayoritas penduduk muslim, negara-negara Arab berada di pihak Palestina dalam konflik perebutan wilayah ini. Negara-negara Arab menganggap Israel sebagai ancaman yang nyata bagi keamanan nasional negaranya ditambah dengan Israel yang didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat. Mereka berupaya untuk menghalangi, meminimalkan, dan menghindari perang konvensional dengan Israel. Salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa negara Arab adalah dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Begitu pun dengan Israel, sulitnya menemukan titik temu dan berdamai dengan Palestina

menjadikan Israel memilih untuk membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara Arab lainnya sebagai upaya lain untuk sebuah perdamaian (Rabinovich, 2015).

Kemudian dalam tulisan Muhammad Yaghi yang berjudul *"The Gulf State Relations with Israel and Trump Plan for Peace"* dijelaskan bagaimana hubungan negara-negara Teluk dengan Israel. Pada umumnya negara-negara Teluk mendukung Palestina dalam konfliknya menghadapi Israel. Negara-negara Teluk menyadari bahwa jika membuka kerjasama dengan Israel akan menjadi sebuah pukulan bagi Palestina. Disisi lain UAE, Bahrain dan Arab Saudi memerlukan Israel dengan alasan bahwa mereka perlu bekerja sama terutama dalam hal keamanan regional. Israel yang terkenal memiliki tentara dan teknologi yang kuat akan membantu negara-negara Teluk dalam melawan hegemoni Iran di Timur Tengah, jika negara-negara Teluk ini melakukan kerjasama. Dengan membuka kerjasama dengan Israel otomatis negara-negara Arab ini akan mendapatkan bantuan untuk menghindari ancaman dan memperkuat keamanan regionalnya (Yaghi, 2020).

Materi lain yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian ini adalah karya tulis Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono yang membahas tentang analisis kebijakan Uni Emirat Arab dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Uni Emirat merupakan negara yang bersamaan dengan Bahrain dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Teori yang digunakan Harun dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel adalah teori kepentingan nasional (*national interest*) dan konsep Realpolitik. Salah satu

kepentingan UEA dari Israel selain industri militer adalah untuk membuka rute perdagangan yang baru. Bagian awal tulisan ini membahas bagaimana sejarah antara UEA dan Israel. Seperti halnya Bahrain, UEA dan Israel sebelumnya tidak pernah terlibat perang namun sikap kedua nya memperlihatkan ketidaksepahaman dalam politik internasional. Dalam kawasan Timur Tengah, UEA dan Israel sama-sama berada di pihak yang pro terhadap Amerika.

AS, UEA dan Bahrain memiliki nota kesepakatan dalam bidang militer dengan tujuan untuk mengimbangi pengaruh Iran di Timur Tengah. Fakta dari adanya pengaruh Iran lebih mendorong mereka untuk melakukan normalisasi dengan Israel dan sedikit mengesampingkan Isu Palestina yang masih berperang dengan Israel. Meskipun keduanya tidak terjalin dalam sebuah hubungan diplomatik, tetapi dalam beberapa pertemuan keduanya sempat membahas sebuah kebijakan untuk kepentingan bersama. Sebagai bagian dari kawasan Timur Tengah, UEA perlu meningkatkan militer mereka untuk menjaga stabilitas negara dan kawasan. Salah satu caranya dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan melakukan normalisasi diharapkan akan membuka akses lebih besar bagi UEA untuk menjalin kerjasama dengan Israel dan Amerika yang merupakan sekutu AS di Timur Tengah. Pasca dibukanya normalisasi antara kedua negara, UEA dan Israel akan meningkatkan kerjasama mereka di bidang lain seperti di bidang ekonomi dan Investasi. Ketertarikan UAE menjalin kerjasama dengan Israel bukan hanya untuk bidang militer saja, namun UEA juga tertarik dengan kemajuan teknologi dan akademisi Israel (Wicaksono, 2020).

Penelitian berikutnya yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Sayugo Harun yang berjudul “Analisa Kebijakan Israel terkait

Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Turki (2016)". Dalam menganalisa kebijakan tersebut Harun menggunakan pendekatan Konstruktivisme untuk memecahkan rumusan masalah. Tulisan ini membahas tentang bagaimana hubungan antara Israel dan Turki sebelum terjadinya normalisasi serta apa yang melatar belakangi kedua negara untuk dapat membuka kerjasama hubungan diplomatik. Israel merupakan negara yang sering mendapat kecaman di kawasan Timur Tengah akibat serangan dan pengakuan wilayah yang dilakukannya terhadap Palestina. Oleh karena itu Israel meminta banyak bantuan dari negara-negara non-Arab untuk mendukung mereka di dunia internasional. Turki sendiri sempat mengecam Israel dikarenakan kebijakan Israel yang mengklaim bahwa Yerusalem merupakan bagian dari wilayahnya *(Jerusalem Act)*. Namun pada tahun 1986 Turki dan Israel disinyalir telah melakukan kerjasama diplomatik di bidang ekonomi dan perdagangan. Saat Israel melakukan serangan ke Jalur Gaza pada tahun 2010, Turki sempat mengecam Israel karena dianggap mengkhianati perjanjian yang selama ini mereka sepakati. Melalui pendekatan konstruktivisme, tulisan ini menyebutkan bahwa adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara yang membuat keduanya membuka kerjasama hubungan diplomatik (Harun, 2018).

Beberapa karya ilmiah diatas merupakan acuan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian Sekuritisasi dalam Normalisasi Hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel. Dalam beberapa jurnal, skripsi dan buku diatas mereka belum membahas secara rinci apa yang melatar belakangi normalisasi Bahrain dan Israel. Dalam buku Itamar Rabinovich dia hanya menjelaskan bagaimana hubungan negara Israel dengan negara-negara Timur Tengah dan bagaimana kondisi politik di Timur Tengah. Kemudian dalam tulisan Muhammad Yaghi berisi tentang

bagaimana hubungan negara-negara Teluk dan Israel. Seperti apa negara-negara Teluk ini memandang keputusan-keputusan presiden AS Donald Trump. Kemudian dalam jurnal Analisa normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kepentingan nasional atau National Interest. Dalam tulisan Sayugo Harun yang membahas tentang normalisasi antara Israel dan Turki menggunakan teori konstruktivisme mengatakan bahwa kepentingan nasional terbentuk dari ideologi negara sampai kepada negara mengeluarkan kebijakan. Beberapa karya ilmiah diatas menjadi acuan penulis untuk melakukan analisis terhadap normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel dengan menggunakan teori sekuritisasi. Karena beberapa penelitian sebelumnya belum terdapat kajian yang membahas tentang normalisasi Bahrain dan Israel terutama dari sudut pandang keamanan dengan menggunakan teori sekuritisasi.

I.6 Kerangka Pemikiran

Decision Making Theory

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis menggunakan teori pembuat keputusan atau *Decision Making Theory*. Menurut penulis teori ini cocok digunakan untuk menganalisa mengapa Bahrain melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Decision Making Theory merupakan sebuah model untuk menjelaskan mengapa sebuah aktor mengambil suatu kebijakan khususnya dalam mengambil kebijakan luar negeri (*Foreign Decision Making*). Proses pengambilan kebijakan dapat diartikan sebagai sebagai suatu langkah yang diambil untuk memilih berbagai alternatif yang ada. Ketika suatu negara mengambil sebuah kebijakan tertentu maka perlu dipertanyakan

mengapa pemimpin negara tersebut mengambil langkah demikian. Menurut William D.Coplin setidaknya terdapat 3 faktor dominan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri (Coplin 1992,30) :

1. Kondisi politik dalam negeri, Situasi politik dalam negeri suatu negara dapat mempengaruhi pembuat kebijakan luar negeri dalam mengambil sebuah keputusan. Situasi politik dalam negeri dapat berupa tuntutan dan dukungan yang nantinya akan membentuk sebuah kondisi di suatu negara yang kemudian akan mempengaruhi para pembuat keputusan untuk mengambil kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti stabilitas negara, kepribadian pengambil keputusan dan adat masyarakat didalamnya.
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, Kapabilitas ekonomi dan kemampuan militer yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara tersebut. Perekonomian suatu negara dapat menjadi sebuah tolak ukur kemampuan negara tersebut dalam dunia internasional. Semakin besar anggaran ekonomi yang dianggarkan untuk sarana militer suatu negara akan berpengaruh besar kepada kemampuan negara tersebut dalam mempertimbangkan pertahanan dan keamanan mereka.
3. Situasi dan Kondisi Internasional, Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi yang ada dalam sistem tersebut akan mempengaruhi bagaimana suatu negara membuat sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang diberikan dapat berpengaruh besar atau kecil tergantung bagaimana kondisi internasional yang ada. Dalam lingkup internasional setiap negara memiliki wilayah kedaulatan atau lokasi yang dikuasainya

yang akan sangat mempengaruhi pengambil keputusan jika terdapat sebuah gangguan.

Ketiga faktor diatas memiliki peran yang saling berkesinambungan satu sama lain dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut William D. Coplin menjelaskan terdapat *Policy Influencer* yaitu aktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Dalam bukunya Coplin menyebutkan terdapat 4 kategori Policy Influencer (Coplin 1992, 82-91):

1. *Bureaucratic Influencers* (Anggota Birokrat) yaitu dapat berupa individu atau organisasi yang ada di dalam pemerintahan yang membantu para pembuat keputusan dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Policy influencer ini dapat memberikan informasi secara langsung kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah diputuskan.
2. *Partisan Influencer* (partai yang mempengaruhi), Sebuah kelompok yang menerima tuntutan-tuntutan politis dari masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah. Mereka harus mampu menekan pemerintahan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat.
3. *Interest Influencer*, yaitu sekelompok individu yang bergabung dalam sebuah gabungan yang memiliki kepentingan sama terkait dengan pengambilan kebijakan luar negeri. Mereka memiliki beberapa metode yang digunakan dalam mempengaruhi para pembuat kebijakan seperti menulis

surat kepada pembuat kebijakan, memberikan dukungan bahkan ancaman kepada para pembuat kebijakan.

4. *Mass Influencer*, Policy influencer type ini terwujud dalam bentuk opini publik yang tertuang dalam sebuah media massa. Opini yang diberikan oleh mass influencer biasanya dijadikan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merasionalisasikan kebijakan luar negerinya.

I.7 Argumen Sementara

Argumen sementara penulis dalam menganalisis apa yang menjadi alasan Bahrain dalam melakukan normalisasi dengan Israel adalah karena adanya ancaman dan klaim kedaulatan yang dilakukan oleh Iran kepada Bahrain. Sejak Bahrain ditinggalkan oleh Inggris, Iran beberapa kali telah berupaya untuk mencaplok wilayah Bahrain dan mengklaim bahwa wilayah Bahrain merupakan bagian dari Iran. Upaya tersebut dilakukan dalam proses perluasan wilayah yang dilakukan oleh Iran. Selain itu Iran juga sering mengganggu urusan internal Bahrain sebagai upaya mereka untuk menguasai Bahrain. Dengan melakukan normalisasi ini, Bahrain akan mendapat bantuan dari Israel yang dikenal sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam bidang militer dan teknologi di Timur Tengah. Bahrain juga akan mendapat bantuan militer dan perlindungan dari AS untuk melindungi kedaulatan negaranya dari ancaman Iran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapat dari tulisan dan karya ilmiah. Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan keadaan yang sedang berlanjut dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan. Metode kualitatif melalui proses pencarian dan penangkapan makna yang diberikan oleh suatu realitas dan fenomena sosial (Soemantri, 2005)..

I.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Bahrain selaku aktor yang melakukan kesepakatan untuk normalisasi kerjasama hubungan diplomatik. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dari skripsi ini adalah speech act dan informasi yang memuat kontestasi politik di kawasan Timur Tengah.

I.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara studi kepustakaan atau studi literatur. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga biasanya telah siap digunakan untuk menunjang penelitian. Data yang didapat oleh peneliti dalam skripsi ini didapat dari buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, website dan media massa yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu analisis normalisasi hubungan diplomatik Bahrain dan Israel. Data yang bersumber dari buku, artikel dan jurnal didapatkan melalui akses internet.

I.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian skripsi ini meliputi proses mengumpulkan data-data dari berbagai sumber sekunder yang merujuk pada buku-buku ilmiah, jurnal, artikel serta sumber lainnya yang relevan dengan teori yang digunakan. Data yang terkumpul dari sumber-sumber tersebut kemudian akan disaring kembali untuk mendapatkan jawaban dari penelitian. Kemudian peneliti membaca, mengevaluasi untuk memperkaya definisi, kata kunci dan terminologi yang dapat menunjang peneliti untuk memahami topik permasalahan yang diangkat. Setelah proses tersebut selesai selanjutnya akan dihubungkan dengan teori dan pertanyaan untuk menyempurnakan penelitian ini. Tahapan yang dilalui meliputi proses pengembangan pemahaman mengenai masalah utama yang akan diteliti, melihat tinjauan pustaka sebagai acuan pembahasan masalah, penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya dan menulis laporan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menganalisis apa yang menjadi alasan Bahrain dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Bab 1 dari penelitian ini akan berisi tentang bagaimana latar belakang, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, argumen sementara dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab 2 dari penelitian ini akan mencakup tentang data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang peneliti dalam melakukan analisis. Data-data tersebut diantaranya adalah tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri Bahrain, bagaimana pengaruh domestik dalam mempengaruhi kebijakan politik negeri,

sejarah hubungan Bahrain dan Israel, adanya intervensi dari Amerika Serikat yang mendorong Bahrain untuk membuka normalisasi dengan Israel, serta bagaimana hubungan antara Bahrain dan Iran sebelumnya sehingga Iran dianggap ancaman oleh Bahrain.

Selanjutnya, dalam bab 3 penulis akan memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang Bahrain dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui pendekatan Decision Making Theory. Penulis membagi bab ini menjadi 2 bagian, bagian pertama mengkolaborasikan komponen-komponen yang ada di dalam decision making theory seperti faktor dominan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri dengan data yang disajikan didalam bab 2. Dan di bagian kedua menjelaskan tentang bagaimana respon audience (regional dan internasional) dalam melihat normalisasi antara Bahrain dan Israel.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAHRAIN

2. 1 Kebijakan dan Orientasi Politik Luar Negeri Bahrain

2.1.1 Sejarah Politik Luar Negeri Bahrain

Pada awalnya Bahrain berada dibawah kuasa Dilmun yang saat itu berkuasa di hampir beberapa negara arab. Pasca Perang Dunia II pemerintah Bahrain berupaya untuk meraih kemerdekaan negara mereka agar terlepas dari genggaman Inggris. Melihat upaya tersebut Inggris langsung meresponnya dengan melarang semua aktivitas politik di Bahrain. Upaya ini dilakukan dengan membentuk sebuah dewan untuk mengawasi urusan dan pemerintahan Bahrain. Bahrain mendapat kemerdekaan pada tahun 1971 di tangan Isa bin Salman Al-Khalifa. Pasca kemerdekaan Bahrain mengeluarkan sebuah konstitusi yang disahkan oleh Amir Syaikh Isa bin Salman yang isinya menekankan asas keadilan, kesejahteraan, menjamin kebebasan dan persamaan, dan mewujudkan tanggung jawab sebagai anggota keluarga Arab dan masyarakat internasional (Bahrain n.d., 12). Setelah mendapat kemerdekaan, pemerintahan Bahrain dilanjutkan oleh Isa bin Salman sebagai keluarga Khalifa (raja). Isa bin Salman memegang kekuasaan di Bahrain kurang lebih selama 28 tahun sampai beliau wafat tahun 1999. Pasca wafatnya Isa, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Hammad bin Isa Al-Khalifa yang merupakan anak dari Isa bin Salman. Kerajaan Bahrain menganut sistem Monarki Konstitusional Demokrasi dan dikepalai oleh Raja Hammad bin Isa Al-Khalifa sebagai kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala negara dibantu oleh perdana menteri yaitu Sheikh Khalifa bin Salman Al-Khalifa.

Jika melihat sejarah Bahrain di masa lalu, arah kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Syaikh Hammad bercermin dari beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Bahrain. Saat pertama kali diangkat menjadi Raja Bahrain, Syaikh Hammad banyak diprotes oleh masyarakat Bahrain karena beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Hammad dianggap banyak membatasi masyarakat untuk memberikan suara kepada pemerintahan. Kebijakan yang dikeluarkan dianggap masyarakat hanya untuk meneguhkan kekuasaan keluarganya. Karena hampir 100% dewan eksekutif pemerintahan berasal dari keluarga raja seperti pada dewan tinggi permusyawaratan yang mengatur seluruh Undang-undang di negara in (Abdullah, 91).

2.1.2 Asas Konstitusi dan Tujuan Politik Luar Negeri Bahrain

Raja Bahrain saat ini yaitu Syaikh Hammad bin Isa Al-Khalifa dituntut untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Konstitusi negara Bahrain yang disahkan oleh Amir Syaikh Isa bin Salman pasca kemerdekaan. Asas konstitusi negara tersebut menjadi dasar syaikh Hammad dalam mengembangkan sistem politiknya agar sejalan dengan dasar demokrasi yang berlaku. Isi konstitusi tersebut diantaranya adalah sejarah negara Bahrain, sistem pemerintahan di masa depan, dasar-dasar ekonomi, keamanan regional, hubungan dengan negara-negara teluk dan luar negeri. Konstitusi Bahrain pada intinya menganut asas keadilan, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mewujudkan tanggung jawab sebagai negara arab, berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya regional dan internasional demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia (Kedutaan Besar Republik Indonesia 2015,12). Asas Konstitusi Bahrain menjadi sebuah acuan/dasar pemerintahan

Bahrain dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan harus berdasarkan pada asas konstitusi tersebut.

Pada bagian yang berbunyi berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya regional dan internasional demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia sejalan dengan arah kebijakan politik luar negeri Bahrain. Dalam upaya menjaga perdamaian regional, Bahrain perlu banyak membuka kerjasamanya dengan negara-negara teluk. Salah satu alasan Bahrain menjadi salah satu pendiri Dewan kerjasama Teluk/GCC (*Gulf Cooperation Council*) adalah agar negara-negara arab dapat bersatu untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Keamanan dan kedamaian negara Bahrain merupakan bagian integral dari keamanan negara-negara teluk lainnya. Kemudian dalam rangka menciptakan perdamaian global Bahrain menganggap hal ini memerlukan penyelesaian dengan cara damai. Negara Bahrain mendukung semua upaya internasional yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai (Legislation & Legal Oppinion Commission, 2021). Seperti yang disebutkan oleh perdana menteri Syaikh Khalifa bahwa pemerintahan saat ini akan tetap melanjutkan kebijakan sesuai dengan konstitusi negara mereka. Merujuk pada isi konstitusi negara Bahrain yaitu menciptakan stabilitas dan keamanan dunia, kebijakan yang dikeluarkan oleh Hammad seperti membuka hubungan diplomatik dengan Israel merupakan langkah yang nyata untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menghindari ancaman dari dalam dan luar negeri.

Politik luar negeri Bahrain dibawah pemerintahan raja Hammad bin Isa Al-Khalifa pada umumnya dijalankan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, menghilangkan konflik dalam negeri, menghindari ancaman eksternal, menjaga stabilitas keamanan negara dan menciptakan perdamaian dunia. Segala bentuk

kebijakan luar negeri Bahrain diharapkan dapat berjalan dengan bantuan sumber daya alam untuk meraih kepentingan negara mereka. Seperti dengan memanfaatkan sumber daya minyak untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Pemerintahan Bahrain juga bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan negara agar tidak diintervensi oleh kekuatan regional maupun global. Dalam menciptakan perdamaian dunia khususnya di kawasan timur tengah Syaikh Hammad memperkuat dan mengembangkan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Arab. Pemerintahan Bahrain percaya bahwa dengan menciptakan hubungan yang baik dengan negara sahabat dapat membantu menciptakan perdamaian global. Hal ini juga akan menciptakan rasa percaya antara negara tanpa mengetahui kemampuan Bahrain (Ahmad Ar-rosyid 2019, 30).

Tujuan Politik luar negeri Bahrain setidaknya ada 4 hal :

1. Penegasan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Bahrain di tingkat regional, arab dan internasional.
2. Memelihara dan melindungi kepentingan strategis, politik dan ekonomi Bahrain di luar negeri.
3. Memperkuat dan mengembangkan hubungan antara kerajaan Bahrain dengan semua negara, organisasi arab dan internasional.
4. Mendukung perjuangan bangsa arab dan islam terutama tentang perjuangan Palestina dan Al-Quds (Ministry of Foreign Affairs, 2022).

2.1.3 Pengaruh Politik Domestik dan Rezim terhadap Politik Luar Negeri

Arah politik luar negeri Bahrain pada dasarnya sudah tercantum dalam konstitusi negara mereka yang disahkan oleh Amir Syaikh. Namun tetap bercermin

kepada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Bahrain seperti peristiwa arab spring yang terjadi di kawasan Arab khususnya di negara Bahrain. Arah politik luar negeri Bahrain lebih ke arah menciptakan perdamaian, membangun hubungan persahabatan dengan semua negara, saling menghormati dan tidak ikut campur terhadap urusan negara lain, menghormati hak asasi manusia menghindari tantangan besar yang terjadi di kawasan, perang saudara dan konflik sektarian. Pendekatan yang diambil oleh Bahrain lebih tertuju kepada perdamaian seperti yang dikatakan oleh menteri dalam negeri mereka bahwa perdamaian adalah hal yang harus kita jaga. Selama 50 tahun terakhir diplomasi Bahrain telah bekerja untuk kemakmuran, keamanan dan kemajuan umat manusia (Al-Majied, 2021).

Pada tahun 2011 terjadi peristiwa arab spring atau protes musim semi arab di beberapa negara Arab termasuk di Bahrain. Saat itu terjadi protes besar-besaran di Manama yang menyerukan perubahan konstitusi baru dan pembentukan parlemen yang lebih representatif dari masyarakat Bahrain. Kemudian klaim kedaulatan yang dilakukan oleh Iran di bawah pemerintahan Shah terhadap Bahrain turut mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Bahrain. Tujuan kebijakan luar negeri syaikh Hammad bin Isa Al-Khalifa secara umum adalah memelihara keamanan nasional, mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya minyak, menciptakan perdamaian global dan lokal, serta memelihara dan melindungi kedaulatan negara Bahrain. Mempertahankan kedaulatan, melindungi tanah Bahrain dan menjaga keuntungan ekonomi politik merupakan hal yang tidak dapat ditembus dan harus dilindungi. Pemerintahan Bahrain mendukung kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di tingkat

regional dan global. Menjaga keamanan dan kedaulatan negara termasuk kewajiban bagi jajaran pemerintahan dan pembuat kebijakan (Al-Hussein, 2020).

Selain untuk menghindari ancaman keamanan, dibukanya hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel dibentuk untuk membantu mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel. Hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani akan berlanjut di semua bidang (BBC 2020). GCC merupakan salah satu ujung tombak Bahrain dalam mengambil kebijakan luar negerinya. Contohnya seperti dalam kasus konflik Israel-Palestina, sikap Bahrain sama halnya seperti negara-negara GCC lainnya yaitu sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan demi terciptanya perdamaian di Timur tengah. GCC berfokus pada koordinasi di bidang keamanan dan ekonomi khususnya dalam memprakarsai perdamaian di Timur Tengah (Kementerian Luar Negeri Indonesia 2020).

2.1.4 Lingkaran Politik Luar Negeri Bahrain

Bahrain setidaknya memiliki 3 lingkaran untuk menopang kebijakan luar negeri negara nya. Yang pertama sentralitas hubungan Bahrain dan Arab Saudi, lingkaran teluk dan lingkaran arab dan dunia islam. Bahrain dan Arab Saudi memiliki ikatan persaudaraan, kekerabatan, garis keturunan, kedekatan raja Bahrain dan raja shaud yang membentuk koordinasi berkelanjutan antara kedua pemimpin negara ini. Kerajaan Bahrain merupakan pasar yang besar bagi sektor swasta perdagangan Arab Saudi. Bahrain dan Saudi juga terikat dalam organisasi liga negara arab dan negara-negara teluk. Keduanya memiliki visi yang sama untuk mempertahankan wilayah teluk dari ancaman luar.

Dalam lingkaran teluk tujuan utama kebijakan luar negeri Bahrain dan negara-negara teluk adalah untuk mempertahankan kawasan dari ancaman Iran. Kebijakan Iran yang dikeluarkan sejak era Shah hingga rezim revolusioner yang didasarkan pada proyek dan perluasan hegemoni regional dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keamanan negara-negara teluk. Lingkaran teluk juga merupakan perpanjangan dari prioritas kebijakan politik luar negeri Bahrain karena visi misinya yang dianggap mewakili kerajaan. Dalam rangka memperkuat perisai keamanan teluk negara-negara anggota GCC pertama-tama harus mengandalkan kesatuan mereka, kemudian menginvestasikan jaringan internasional dengan negara-negara yang menentang Iran. Maka sangat penting bagi Bahrain dan negara-negara teluk bersatu untuk memperkuat dewan kerjasama teluk dalam menghadapi ancaman khususnya dari Iran. Dalam lingkaran arab dan dunia islam, Bahrain bersama lingkarannya memfokuskan untuk mendukung proses kemajuan dengan negara-negara islam serta mendukung isu-isu arab dan islam terutama isu Palestina. Dasar Bahrain dalam mendukung Palestina didasarkan pada lingkaran arab dan islam sendiri dan keanggotaan Bahrain dalam dewan kerjasama teluk. Dalam kerangka Arab, Bahrain menekankan untuk mendukung liga arab sebagai entitas organisasi mereka. Organisasi liga negara-negara arab menyerukan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi untuk peningkatan dan kemajuan bersama (Menafn, 2018).

2.2 Hubungan Diplomatik Bahrain

2.2.1 Sejarah Hubungan Bahrain-Israel

Normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020 di Gedung Putih Amerika Serikat dan diumumkan

langsung oleh Presiden AS Donald Trump. Perjanjian kesepakatan untuk membuka hubungan diplomatik dan kerjasama secara penuh antara Bahrain dan Israel tertuang dalam perjanjian *Abraham Accord : Declaration of Peace, Cooperation, And Constructive Diplomatic and Friendly Relations.* Perjanjian tersebut berisi tentang sebuah pernyataan yang diumumkan oleh Kerajaan Bahrain dan Negara Israel. Melalui perdana menterinya, Benyamin Netanyahu dan Raja Hammad bin Isa menyatakan bahwa Bahrain dan Israel telah sepakat untuk membuka jalinan persahabatan dan kerjasama untuk mewujudkan kawasan Timur Tengah yang stabil, aman, dan sejahtera untuk kepentingan semua negara di Timur Tengah. Dalam dokumen perjanjian *Abraham Accord : Declaration of Peace, Cooperation, And Constructive Diplomatic and Friendly Relations* yang diumumkan oleh negara Israel dan juga Kerajaan Bahrain terdapat kutipan yang berbunyi :

> *"The Kingdom of Bahrain and the State of Israel trust that this development will help lead to a future in which all people and all faiths can live together in the spirit of cooperation and enjoy peace and prosperity where states focus on shared interest and building a better future".*

Dalam perjanjian Abraham Accord disebutkan bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang keamanan. Bahrain, Israel dan AS menyatakan bahwa mereka akan menjalin "Hubungan Diplomatik Penuh"(CNN Indonesia, 2020). Bahrain dan Israel telah sepakat untuk membuka kerjasama di berbagai bidang seperti militer, pariwisata kerjasama keuangan dan ekonomi. Kerjasama antara Bahrain dan Israel dibentuk demi mencapai kepentingan masing-masing negara. Bahrain dan Israel sepakat untuk

menandatangani nota kesepakatan untuk kerjasama bilateral yang bermanfaat untuk kerajaan Bahrain dan negara Israel.

Hubungan diplomasi Bahrain dan Israel disinyalir telah dimulai dari tahun 1990 an. Saat itu menteri lingkungan Israel, Yossi Sarid mengunjungi pejabat diplomatik Bahrain di Manama. Dalam forum tersebut Yossi diminta untuk menyampaikan pesan bahwa kerjasama di bidang lingkungan merupakan langkah awal untuk menjadikan hubungan antara keduanya menjadi lebih erat (Al-Thani, 2017). Pada Januari tahun 2000 putra mahkota Bahrain, Shaikh Salman bin Hammad Al-Khalifa telah memulai diplomasi dengan Israel melalui para pejabatnya dengan mengadakan pertemuan di Davos bersama Shimon Peres, Menteri kerjasama regional Israel saat itu. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama antara pejabat kedua negara setelah hampir 10 tahun. Kemudian pada tahun 2007 menteri luar negeri dari kedua negara mengadakan pertemuan saat berpartisipasi dalam pertemuan majelis umum PBB. Pertemuan antar kedua negara ini berlanjut pada tahun 2009 saat konferensi PBB di New York. Di Tahun yang sama, perwakilan Bahrain melakukan kunjungan ke Tel Aviv untuk mengambil warga mereka yang ditahan di Tel Aviv karena Pro terhadap Palestina. Kunjungan delegasi Bahrain ini merupakan kunjungan yang sebelumnya tidak pernah terjadi akibat panasnya konflik antara Israel dan Palestina. Hal tersebut juga disinyalir sebagai alasan mengapa selama ini pertemuan antara perwakilan Bahrain dan Israel dilakukan secara tertutup. Sebagai bagian dari negara Arab Bahrain tentunya berada di pihak Palestina dalam konflik antara Israel dan Palestina. Pada tahun 2011 Bahrain dan Israel sempat akan membuka normalisasi hubungan diplomatik namun terhambat oleh Protes musim semi arab/arab spring (Al-Jazeera,

2020). Saat itu terjadi pemberontakan besar-besaran dari masyarakat Bahrain untuk menurunkan Raja Hammad dari kursi pemerintahan. Pemberontakan ini terjadi akibat ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan Syaikh Hammad.

Pasca kegagalan normalisasi pada tahun 2011 akibat terjadinya peristiwa arab spring di Bahrain, hubungan Bahrain dan Israel terlihat semakin dekat. Setelah peristiwa tersebut kedua negara beberapa menjalin hubungan secara terbuka. Selanjutnya hubungan Bahrain dan Israel juga berlanjut pada tahun 2017 saat Bahrain mengizinkan delegasi Israel untuk ikut dalam konferensi FIFA di Manama. Sekelompok orang dari Bahrain juga telah datang ke Israel untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama saat terjadi konflik di Yerusalem. Dukungan Bahrain terhadap Israel juga terjadi pada tahun 2018 saat Menteri Luar Negeri Bahrain mendukung Israel untuk mempertahankan diri. Pada tahun 2019 Amerika Serikat menyelenggarakan Lokakarya di Manama Bahrain, sebagai upaya rencana perdamaian Amerika di Timur Tengah. Lokakarya tersebut dihadiri oleh beberapa negara Timur Tengah termasuk Israel. Hal ini mendapat banyak kecaman terutama dari masyarakat Palestina. Palestina bahkan memboikot konferensi tersebut karena menganggapnya sebagai strategi licik AS di Timur Tengah. Di sela-sela konferensi tersebut Menlu Bahrain mengatakan Bahwa Israel termasuk bagian dari Timur Tengah dan orang-orang Yahudi termasuk pewaris wilayah ini (Al-Jazeera, 2020). Kunjungan resmi pejabat Israel ke Bahrain pasca dibukanya hubungan diplomatik terjadi saat menteri luar negeri Israel, Yair Lapid tiba di Bahrain untuk meresmikan kedutaan besar Israel dan menandatangani kesepakatan bilateral. Melalui tweetnya Yair Lapid mengatakan *"We've landed in Bahrain. I'm proud to represent Israel*

in an official and historic first in the kingdom. Thanks for the warm reception"(Al-Jazeera, 2021).

Tabel 1.1 Hubungan Bahrain dan Israel

No	Tahun	Peristiwa
1	1994 M	Menteri Lingkungan Israel, Yossi Sarid mengunjungi ibu kota Bahrain untuk membahas isu lingkungan sebagai kelanjutan dari proses perdamaian multilateral pasca konferensi Madrid
2	2000 M	Putra Mahkota Bahrain, Salman bin Hammad Al-Khalifa mengadakan pertemuan dengan Shimon Peres (Menteri Kerjasama regional Israel)
3	2005 M	Wakil perdana menteri Bahrain, Mohamed bin Mubarak mengambil keputusan untuk melarang masuk barang-barang dari Israel dan memboikot kantor Israel
4	2006 M	Duta Besar Bahrain untuk AS, Nasser Al-Balushi mengirim surat ke kantor AS untuk kembali memboikot barang-barang Israel dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama kawasan
5	2007 M	Raja Hammad bin Isa Al-Khalifa mengunjungi markas besar yahudi (American Friends of Lubavitch) di AS
6	2009 M	Perwakilan Bahrain melakukan kunjungan ke Tel Aviv untuk mengambil warga mereka yang ditahan di Tel Aviv karena Pro terhadap Palestina
7	2009 M	Menteri Luar negeri Israel bertemu dengan Raja Hammad di New York setelah konferensi PBB untuk melakukan dialog yang positif
8	2014 M	Menteri Luar negeri Bahrain, Khaled bin Ahmed bertemu dengan delegasi dari Komite Yahudi Amerika di New York untuk membahas file nuklir Iran
9	2017 M	Pemerintah Bahrain mengizinkan delegasi Israel untuk mengikuti konferensi FIFA di Manama
10	2020 M	Bahrain dan Israel secara resmi mengumumkan bahwa keduanya sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik yang dilaksanakan di Amerika Serikat

Dari pemaparan sejarah hubungan Bahrain dan Israel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selama kurang lebih 20 tahun ini hubungan antara Bahrain dan Israel selalu baik-baik saja dan keduanya tidak pernah terlibat dalam peperangan. Bahkan keduanya beberapa kali telah mengadakan pertemuan untuk menjalin sebuah kerjasama. Namun beberapa kali pertemuan yang dilakukan antara

perwakilan Bahrain dan Israel dilakukan secara tertutup. Hal ini dikarenakan karena adanya larangan dari negara-negara anggota GCC yang melarang masyarakat Yahudi untuk berkunjung ke wilayah teluk. Pasca gagalnya proses normalisasi di tahun 2011 akibat adanya peristiwa Arab Spring di Bahrain, hubungan keduanya mulai terlihat terbuka. Akan tetapi sebelum normalisasi antara keduanya diresmikan, pertemuan antara Bahrain dan Israel dilakukan secara tertutup. Dengan alasan karena Bahrain menghargai perjuangan Palestina yang tengah berperang untuk mendapat kemerdekaan dan terlepas dari peperangan dengan Israel.

2.2.2 Bahrain-Israel dan Negara-negara Teluk

Bahrain tergabung dalam organisasi *Gulf Cooperation Council* (GCC) yaitu Dewan kerjasama negara-negara teluk yang berdiri pada tahun 1981. Bahrain dan negara anggota GCC lainnya mendirikan sebuah dewan kerjasama sebagai respon terhadap ancaman revolusi Iran yang dikhawatirkan akan semakin meluas. Gulf Cooperation Council berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 1981 di Riyyadh dan disepakati oleh 6 negara yaitu Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar dan Quwait. Selain sebagai respon terhadap meluasnya pengaruh Iran di Timur Tengah, GCC juga dibentuk untuk mempromosikan koordinasi, hubungan kerjasama di bidang politik, ekonomi, militer dan pertahanan. Bagi Bahrain GCC sangat diperlukan, mengingat negara teluk ini tidak pernah terlepas dari konflik baik secara internal maupun eksternal. Namun pada tahun 2014 negara-negara anggota GCC sempat menarik kedutaan besar mereka dari Qatar. Hal ini dikarena Qatar dianggap telah melanggar peraturan yang tertulis dalam GCC yaitu menjaga stabilitas keamanan (Sijekto 2016,11). Qatar telah mendukung ikhwanul muslimin di Mesir, sedangkan ideologi ikhwanul muslimin tersebut telah menentang prinsip

kepemimpinan dinasti yang banyak dianut oleh negara teluk. Menteri Luar Negeri Bahrain Syaikh Khalid bin Ahmad A-Khalifa menganggap ikhwanul muslimin akan memberikan ancaman keamanan bagi negara Bahrain dan juga wilayah Arab lainnya. Bahrain telah memutus hubungan dengan Qatar baik itu dalam bentuk forum, dialog dan melarang maskapai penerbangan Qatar melintas di atas wilayah Bahrain.

Melihat kondisi sosial dan gejolak politik yang terjadi di Bahrain, negara-negara anggota GCC dapat mencontoh Bahrain dalam memanfaatkan sumber daya manusianya. Dengan sumber daya minyak yang lebih kecil bila dibanding dengan negara-negara anggota GCC lainnya Bahrain mampu mencapai ledakan ekonomi, pembangunan perkotaan yang luar biasa, mempromosikan hidup secara damai di antara banyak agama dan budaya. Hal ini dapat menjadi cerminan bagi negara-negara teluk bagaimana Bahrain mampu memanfaatkan dengan baik kondisi geografisnya untuk kemajuan negaranya, terlebih saat terjadinya arab spring Bahrain merupakan negara pertama yang mengalami penurunan produksi minyak di kawasan itu (Koninment, 2012). GCC merupakan salah satu ujung tombak Bahrain dalam mengambil kebijakan luar negeri. Contohnya seperti dalam kasus konflik Israel-Palestina, sikap Bahrain sama halnya seperti negara-negara GCC lainnya yaitu sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan demi terciptanya perdamaian di Timur tengah. GCC berfokus pada koordinasi di bidang keamanan dan ekonomi khususnya dalam memprakarsai perdamaian di Timur Tengah (Kementerian Luar Negeri Indonesia 2020).

Menurut Syaikh Hammad, dibukanya normalisasi antara Bahrain dan Israel tidak mengurangi dukungan Bahrain terhadap Palestina, tetapi sebagai jembatan

untuk mengakhiri konflik antara Palestina dan israel. Namun bagi Palestina hal ini dianggap sebagai penghambat negaranya untuk mendapat kemerdekaan. Palestina mengutuk langkah diplomatik ini sebagai "tikaman dari belakang". Seperti yang dikatakan oleh syaikh Rasyid yaitu menteri dalam negeri Bahrain yang menyatakan bahwa normalisasi Bahrain dan Israel untuk memperkuat keamanan dari ancaman Iran. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani juga dalam pidatonya mengharapkan "kerjasama yang bermanfaat di semua bidang"(BBC News, 2020).

2. 3 Peran Amerika Serikat dalam Politik Regional Timur Tengah

2.3.1 Intervensi Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi negara yang memediasi dibukanya normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain, UEA dan Israel. Amerika memiliki peran yang signifikan dalam dibukanya normalisasi antara kedua negara ini dengan Israel. Peran Amerika serikat dalam terciptanya normalisasi antar negara-negara timur tengah merupakan salah satu cara mera untuk menjalankan politik luar negeri AS di Timur Tengah. Memainkan peran di dunia internasional dan memberikan pengaruh khususnya di Timur Tengah menjadi salah satu rencana kebijakan politik luar negeri Amerika. Hal ini dilakukan oleh Amerika demi tercapainya kepentingan nasional mereka serta pengakuan dunia internasional bahwa Amerika merupakan negara super power. Sesuai dengan prinsip kebijakan politik luar negeri AS di era Trump yaitu dominasi dan superioritas ekonomi. Untuk menjalankan prinsip tersebut langkah yang diambil Amerika adalah dengan memperluas wilayah kekuasaan (Schultz 2019).

Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald trump menyaksikan secara langsung dibuka nya normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel

yang di gelar di Gedung Putih, Amerika. Menurut Trump normalisasi antara Bahrain dan Israel adalah terobosan yang bersejarah untuk perdamaian lebih lanjut di Timur Tengah yang akan meningkatkan stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di wilayah ini. Namun bagi Palestina hal ini tetap sebagai penghalang mereka untuk dapat mencapai kepentingan negaranya (BBC News 2020). Meskipun dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa hal ini merupakan terobosan baru untuk perdamaian di wilayah Timur Tengah. Selama bertahun-tahun kawasan Timur Tengah terus dilanda konflik terutama konflik perebutan wilayah antara Palestina dan Israel. Presiden Donald Trump memiliki sebuah rencana yang disebut dengan "*Trump plan for Peace*" atau rencana perdamaian Trump. Dalam rencana ini Presiden Donald Trump menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina asalkan mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Trump. Saat digelarnya pertemuan Liga Arab, negara-negara teluk menolak upaya perdamaian yang direncakan oleh Trump. Mereka menganggap hal ini hanya sebuah permainan politik Amerika agar dapat berkuasa di Timur Tengah. Berbeda dengan Bahrain dan UEA yang mendukung rencana perdamaian Trump ini sebagai titik awal untuk bisa membawa Palestina dan Israel ke meja perundingan. Bahrain dan UEA berharap agara Palestina dapat mengikuti rencana tersebut dan mengembangkannya sampai mereka di titik mereka dapat menerima nya (Yaghi 2020).

Sebagai sekutu Israel, Amerika tentunya mendukung penuh politik Israel terutama dalam kebijakan politik Israel di Timur Tengah. Amerika merupakan negara yang mengakui kedaulatan Israel pasca mendapatkan kemerdekaan nya. Saat Israel diberikan mandat oleh Inggris untuk mendirikan negara Yahudi, Amerika mendukung Israel untuk mendirikan negara yahudi di wilayah Palestina.

Adanya kelompok yang dinamai "*Israel Lobby*" sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS untuk mendukung Israel. (Aswar 2018). Sejak saat itu hubungan diplomatik antara Amerika dan Israel semakin terbentuk. Palestina dan negara-negara Arab lainnya yang tidak terima dengan keputusan Israel yang akan mendirikan negara yahudi di tanah Palestina melakukan pemberontakan terhadap Israel. Palestina merasa dikhianati oleh negara-negara Arab yang telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal selama ini Palestina mengandalkan dukungan dari negara-negara Arab dalam perang melawan Israel.

Isu perdamaian Palestina dan Israel merupakan salah satu fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Setelah sebelumnya gagal merealisasikan perdamaian melalui rencana "*Trump Plane For Peace*", dibukanya kerjasama antara Israel dan negara-negara Arab akan membantu kedua negara menuju perdamaian. Selain untuk mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel akan membantu negara-negara di Timur Tengah untuk tidak bergantung kepada Militer AS dalam menjaga perdamaian Timur Tengah (Ottaway et al. 2008,21). Menteri Luar negeri Amerika, Mike Pompeo mengatakan "Dengan melakukan kerjasama mereka mencerminkan dinamika yang berubah di kawasan, dimana negara-negara dengan tepat mengakui perlunya kerjasama kawasan untuk melawan pengaruh Iran dan menghasilkan kemakmuran". Selanjutnya Pompeo menambahkan hal yang dilakukan oleh Bahrain dan UEA yaitu melakukan normalisasi dengan Israel merupakan hal positif yang harus diikuti oleh negara-negara Arab. Karena hal ini dapat membantu menjaga stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah (CNN Indonesia 2020).

2.3.2 Hubungan Amerika Serikat dan Iran

Amerika sendiri memiliki hubungan sejarah yang berwarna dengan Iran khususnya dalam memberikan pengaruh di Timur Tengah. Ketegangan antara kedua ini terlihat sejak Revolusi Iran di tahun 1979 yang telah banyak merubah sistem politik dan pemerintahan. Pasca mengalami revolusi, Iran menjadi negara independen yang mencoba kekuatan regionalnya untuk dapat berkuasa di Timur Tengah. Sejak akhir abad 19 Amerika telah menjadi negara yang mendominasi bidang ekonomi dan militer dunia. Ketika Iran mulai mengembangkan tenaga nuklir yang dimilikinya, Amerika menganggap hal tersebut merupakan sebuah ancaman yang akan mempengaruhi hegemoninya di Timur Tengah.

Bagi Amerika Timur Tengah merupakan tempat yang memiliki nilai strategis dan kaya akan simpanan minyak bumi. Maka tidak heran jika terdapat sebuah ancaman yang dapat menggulingkan Amerika dalam memberikan pengaruh di Timur Tengah Amerika langsung merespon hal tersebut. Contohnya seperti pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran dianggap akan mempengaruhi kekuatan AS di Timur Tengah. Salah satu cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah adalah dengan mendorong negara-negara arab untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Hal ini tentu akan menarik simpati negara-negara karena akan mendapat bantuan militer AS dalam rangka menjaga stabilitas keamanan mereka (Irawan 2021).

2.4 Hubungan Bahrain dan Iran

Keputusan Bahrain untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tidak lepas dari sikap yang dilakukan oleh Iran di Timur Tengah khususnya terhadap Bahrain. Bahrain beberapa kali meminta Iran untuk

menghentikan segala tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di Teluk Arab khususnya di Bahrain. Gesekan antara Bahrain dan Iran berawal dari tuduhan Iran dan tuntutan Shah yang mencoba menarik terusan suez timur dan wilayah teluk persia sebagai bagian dari wilayah Iran dan Bahrain harus mengembalikannya ke Iran. Tuduhan ini direspon oleh Bahrain dengan mencari fakta-fakta untuk menolak dan menyangkal tuduhan Iran. Ketika revolusi Iran dipimpin oleh Khomeini tuduhan ini sempat dianggap berakhir karena Khomeini mengangkat slogan-slogan untuk mempersatukan umat islam. Namun rencana-rencana Khomeini tersebut hanyalah sebuah tipu daya bagi orang-orang islam untuk kembali menghidupkan rencana eksploitasi Iran. Bahrain membantah tuduhan-tuduhan dan eksploitasi Iran terhadap Bahrain kurang lebih selama 3 kali yaitu pada tahun 80-an, tahun 1990 dan di tahun 2011 (Menafn 2018).

Saat Trump menjadi Presiden Amerika, negara-negara teluk merasa lega karena Trump menjanjikan untuk membatalkan perjanjian nuklir dengan Iran yang sebelumnya disepakati oleh Barack Obama. Namun Trump memberikan sebuah persyaratan untuk dibatalkan nya perjanjian tersebut, beberapa persyaratan itu diantaranya Trump meminta negara-negara teluk untuk membayar ratusan miliar kepada Amerika dan menandatangani perjanjian non-agresi dengan Israel. Keputusan-keputusan Trump berbeda dengan pemerintahan Obama yang mana Trump lebih menghadang kehadiran Iran di Timur Tengah (Yaghi 2020). Pada tahun 2019 Bahrain bergabung dengan *International Security Maritime Construct* (ISMC) yang dipimpin oleh Amerika untuk mengamankan teluk dari serangan Iran. Saat akan menggulingkan Iran dari Kuwait pada tahun 1991, Bahrain mengirimkan pasukan nya untuk bergabung dengan Amerika dalam operasi tersebut. Pilot

Bahrain yang juga menampung pasukan AS melakukan serangan terhadap pasukan Irak. Kemudian Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal dan merusak beberapa fasilitas disana (Katzman 2020,12).

Bahrain mengalami peristiwa arab spring pada tahun 2011, dimana saat peristiwa tersebut terjadi kekacauan dan demo besar-besaran terhadap pemerintahan Bahrain. Para pengunjuk rasa meminta agar Raja Hammad turun dari kursi pimpinan Bahrain, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Syaikh Hammad. Iran berharap agar kelompok pengunjuk Bahrain berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Hammad. Namun pada peristiwa itu, pemerintah Bahrain berhasil menghentikan demo dan memundur paksa para pengunjuk rasa. Pemerintah Bahrain menuduh Iran sering ikut campur terhadap urusan internal Bahrain seperti mengobarkan kerusuhan, menyediakan dana dan senjata untuk pemberontakan di Bahrain. Abdullah bin Ahmed Al-Khalifa mengatakan “""apa yang dilihat dari pengalaman Bahrain adalah campur tangan terus menerus Iran dalam urusan internal Bahrain"(STAFF TOI 2021). Raja Hammad menegaskan bahwa dibukanya hubungan diplomatik ini untuk menghalau ancaman dari Iran. Iran sudah banyak mendominasi di Timur Tengah dan akan menjadi ancaman bagi keamanan internal Bahrain. Iran sendiri merupakan musuh dari Israel dan Amerika. Sebelum Bahrain, satu bulan sebelum nya UEA juga telah menandatangani kesepakatan untuk normalisasi dengan Israel. Dengan terbentuknya hubungan Israel dengan dua negara Arab ini, semakin memperkuat Israel untuk mendapatkan landasan politik di Timur tengah, memperluas hubungan perdagangan dan kekuasaan serta memperkuat poros Arab-Israel dalam menghadapi Iran.(Abu Amer, 2020). Arab dan Iran merupakan dua negara besar

yang berada di kawasan Timur Tengah. Perang antara Arab dan Iran disebabkan oleh perbedaan sekte agama islam, dimana Iran dengan mayoritas Syiah dan Arab Saudi dengan mayoritas muslim sunni. Namun sejauh ini perang antara keduanya hanya terjadi melalui proksi. Kawasan teluk menjadi tempat kedua negara untuk memperlihatkan kekuatan masing-masing negara. Kedua negara ini menjadi pilihan bagi negara-negara di Timur Tengah untuk bersekutu. Bahrain berada di posisi yang mendukung Arab Saudi atas dasar perilaku Iran yang sering menjadi ancaman bagi Bahrain. Iran beberapa kali telah mengklaim bahwa Bahrain merupakan bagian dari wilayahnya. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi regional Bahrain dan menjadi fokus kebijakan luar negeri Bahrain dalam mempertahankan kedaulatan negara nya.

Pada tanggal 20 September tahun 2020 Bahrain telah menggagalkan percobaan ancaman teroris yang diduga merupakan komplotan teroris yang didanai dan didukung oleh Iran. Jaringan teroris yang merupakan bagian dari jaringan teror bernama “Brigade Qasem Soleimani” dan organisasi teror Saraya Al-Ashtar diduga akan meledakkan bom di beberapa titik negara Bahrain. Komplotan teroris tersebut telah menerima bahan peledak dan uang dari IRGC dan telah menjalani pelatihan teroris di kamp pelatihan Iran. Aparat keamanan Bahrain telah berjaga-jaga di beberapa tempat seperti fasilitas umum, depot minyak dan instalasi-instalasi keamanan Bahrain. Alhasil aparat keamanan Bahrain berhasil menggagalkan percobaan terorisme tersebut, karena berhasil menemukan alat yang diduga merupakan bahan peledak miliki kelompok terorisme. Percobaan aksi terorisme yang terjadi pada tahun 2017 juga berhasil digagalkan oleh aparat keamanan Bahrain. Saat itu aparat keamanan Bahrain berhasil menyita sejumlah bahan peledak, granat, senjata api dan senapan. Menurut wakil menteri dalam negeri

Bahrain, pangkalan militer AS di Bahrain merupakan salah satu target yang akan diserang oleh para teroris untuk menghancurkan stabilitas keamanan Bahrain (Shay, 2020).

Sama halnya seperti Bahrain, Israel juga berada dalam posisi yang berpihak kepada negara-negara Arab dan menentang Iran di Timur Tengah, hal ini tidak terlepas dari hubungan Israel dan Iran yang memanas. Pada awalnya Iran dan Israel merupakan sekutu dimana pasca kemerdekaan Israel pada tahun 1948 Iran menjadi pemasok terbesar senjata kepada Israel. Hubungan keduanya mulai memanas ketika monarki digulingkan. Iran menganggap bahwa Israel merupakan "setan kecil" dan Amerika Serikat sekutu Israel sebagai "setan besar"(Fakta Hubungan Israel-Iran, 2021). Sebagai negara dengan mayoritas Islam, Iran berbalik arah menjadi pendukung Palestina dalam konflik antara Palestina dan Israel. Iran mendukung militan Palestina yaitu Hammas untuk tetap mempertahankan wilayahnya dari aneksasi Israel. Dukungan yang diberikan Iran kepada Hammas dan organisasi Palestina lainnya berupa dukungan keuangan dan juga militer untuk melawan Israel. Bantuan yang diberikan Iran dirasa sangat mendukung persenjataan Palestina. Selain memberikan dukungan kepada Hammas di palestina, Iran juga memberikan dukungan persenjataan kepada Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman (BBC News 2017). Memiliki kesamaan dalam berperang melawan Iran, Israel semakin membuka hubungannya dengan negara-negara Arab untuk memperkuat poros pertahanan mereka di kawasan Timur Tengah.

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAHRAIN DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DAN ISRAEL

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Bahrain

3.1.1 Kondisi Domestik Bahrain

Pada Bab 3 penulis akan membahas alasan utama dan apa yang menjadi latar belakang Bahrain membuka hubungan diplomatik dengan Israel melalui pendekatan Decision Making Theory. Sebelumnya telah dijelaskan terdapat 3 faktor dominan yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Di bagian ini penulis akan mengkolaborasikan faktor pertama yaitu kondisi domestik negara Bahrain dalam memutuskan kebijakan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Bahrain merupakan negara yang tidak pernah lepas dari konflik internal, dimulai sejak Raja Hammad bin Isa naik menjadi Raja Bahrain untuk menggantikan posisi Isa bin Hammad. Raja Hammad banyak diprotes oleh masyarakat Bahrain karena keputusan yang dikeluarkan dianggap banyak membatasi masyarakat dalam memberikan suara kepada pemerintahan. Mayoritas masyarakat Bahrain merupakan bagian dari syiah Bahrain, sedangkan kursi pemerintahan hampir dikuasai oleh pihak sunni termasuk keluarga raja Bahrain. Penguasa sunni telah berkomitmen untuk melarang syiah ikut berorganisasi dalam memajukan politik mereka.

Pada tahun 1975 masyarakat Bahrain melakukan protes kepada pemerintahan dengan tuntutan untuk dibubarkannya parlemen Bahrain saat itu.

Protes dari masyarakat berlanjut pada tahun 1981 dimana rakyat Bahrain menunjukan protes kepada pemerintahan Raja Hammad dengan melakukan kudeta yang dilakukan oleh anggota front Islam yang dipimpin oleh Ol-Eslam Hadi Al-Mudarrisi. Kemudian sepanjang tahun 1990.an gerakan protes dari rakyat Bahrain kembali berlanjut, mereka menyerukan pemulihan pada majlis nasional dan memberikan kritik kepada raja yang berkuasa. Puncaknya pada tahun 2011, terjadi peristiwa arab spring/protes musim semi arab di Bahrain. Peristiwa Arab Spring terjadi beberapa negara Arab termasuk Bahrain. Saat itu terjadi demo besar-besaran dari masyarakat Bahrain yang menuntut penggulingan Raja Hammad dari kursi pemerintahan (Abdullah 2021).

Ketika Bahrain secara resmi mengumumkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, banyak warga Bahrain yang menentang perjanjian. Namun penguasa Bahrain seperti mengabaikan penolakan rakyatnya terhadap kebijakan yang telah diambil tersebut. Raja Hammad mengatakan "Penandatanganan deklarasi ini merupakan langkah bersejarah untuk mencapai perdamaian komprehensif di Timur Tengah, mewujudkan aspirasi rakyat untuk keamanan, stabilitas, kemakmuran dan pengembangan agama mereka"(Bahrain News Agency 2022). Dalam konteks normalisasi Bahrain dan Israel, kebijakan pemerintah Bahrain yang memutuskan untuk membuka hubungan dengan Israel merupakan tindakan yang dianggap diluar kebiasaan pemerintah Bahrain. Hal ini berkaitan dengan dukungan politik Bahrain terhadap Palestina dalam konfliknya dengan Israel. Pemerintah Bahrain selalu mendukung penuh Palestina untuk segera mendapatkan kemerdekaannya dan mengakhiri konflik dengan Israel. Ketika

Bahrain membuka kerjasama dengan Israel, ini merupakan tindakan diluar kebiasaan pemerintah Bahrain karena dianggap mengkhianati Palestina.

3.1.2 Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi di suatu negara merupakan salah satu faktor yang akan memberikan pengaruh kepada pemerintahan untuk menentukan sikap negara tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh William D.Coplin bahwa kemampuan ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri tersebut. Coplin juga menyebutkan bahwa salah satu kriteria untuk melihat bagaimana perekonomian di suatu negara adalah dengan melihat bagaimana ketergantungan negara tersebut terhadap perdagangan internasional (Coplin 1992, 115). Sama halnya seperti dengan mayoritas negara teluknya lainnya, perekonomian di Bahrain sangat bergantung kepada sektor minyak. Pada tahun 2017 sektor minyak menyumbang hampir 75% pendapatan negara Bahrain.

Meskipun di wilayah Timur Tengah Bahrain merupakan negara dengan tingkat ekspor minyak yang paling rendah. Namun pada tahun 2018 Bahrain dikabarkan telah menemukan ladang minyak baru di wilayah lepas pantai barat Bahrain. Menteri perminyakan Bahrain, Sheikh Mohammed bin Khalifa mengumumkan penemuan cadangan minyak tersebut diprediksi mencapai 80 miliar barel minyak shale. Menurut para peneliti penemuan ladang baru tersebut akan membantu kerajaan Bahrain untuk memperbaiki kekuatan ekonomi negara secara dramatis (Natalian 2018). Tingginya GDP (Gross Domestic Product) negara Bahrain sangat bergantung kepada harga minyak dunia dan cadangan minyak yang ada di Bahrain.

Bahrain mulai membangun angkatan militernya pada tahun 1968 sebagai kelanjutan dari proyek negara-negara modern. Pemerintah Inggris mengizinkan Bahrain untuk mempertahankan sektor militer dengan tujuan melindungi penguasa dan menjalankan bisnis dalam negeri. Sektor militer dibutuhkan dalam rangka modernisasi, perluasan struktur negara, dan pertahanan negara. Angkatan militer Bahrain dipercayai untuk mempertahankan tanah Bahrain dari ancaman yang datang baik itu internal maupun eksternal. Raja Hammad bin Isa Al-Khalifa saat itu menjadi pemimpin pasukan ini menyediakan peralatan militer modern, senjata dan mengirim pasukan pertahanan Bahrain ke kursus militer di beberapa perguruan tinggi militer dunia (Radhi 2022). Seperti pada umumnya di negara-negara teluk, para penguasa elit selalu ikut terjun dalam pembentukan militer berkaitan dengan hubungan kepentingan bersama. Di Bahrain sendiri institusi-institusi militer saat itu hanya bertugas untuk melindungi negara dari ancaman internal, sedangkan untuk menjaga ancaman external ditugaskan kepada aliansi keamanan dari keluarga kerajaan.

Raja Hammad menyadari bahwa kapasitas militer dari keluarga kerajaan sangat kurang jika terjun ke dalam medan tempur. Beberapa pengamat mengatakan bahwa tentara Bahrain memiliki keterbatasan untuk memelihara peralatan modern dan militer Bahrain tidak dapat melakukan misi militernya di perbatasan-perbatasan. Saat itu Bahrain mulai menjalin hubungan dengan Amerika Serikat untuk ketergantungan militer mereka. Selain itu, adanya ancaman militer yang diberikan kepada Bahrain mendorong sistem politik untuk memperkuat pertahanan negara Bahrain (Al-Mursyid 2013). Kurangnya angkatan militer yang dimiliki Bahrain serta banyaknya ancaman yang diterima Bahrain banyak mempengaruhi

kebijakan politik luar negeri Bahrain untuk melakukan kerjasama dengan negara dalam rangka memperkuat sektor militer mereka.

Dengan dibukanya hubungan diplomatik ini Bahrain mengharapkan bantuan dan pelatihan dari Israel untuk dapat mencapai kepentingan negara nya (Asseburg and Henkel 2021, 10). Dengan membuka hubungan diplomatik bersama Israel akan memperkuat sektor keamanan Bahrain untuk menghalau ancaman Iran. Selain untuk menjaga keamanan regional negara, ketertarikan Bahrain melakukan normalisasi dengan Israel adalah untuk membuka kerjasama di beberapa bidang lainnya. Di kawasan timur tengah, Israel merupakan salah satu negara paling maju dalam bidang militer, yang mana militer Israel sendiri disuplai langsung oleh Amerika Serikat. Selain dalam segi militernya, Israel juga memiliki kemampuan yang tinggi dalam teknologinya, kemampuan Israel di bidang teknologi bahkan hampir sama dengan kekuatan China, Amerika, Rusia dan Inggris. Israel menetapkan bahwa negaranya merupakan eksportir dan produsen utama di timur tengah untuk persenjataan militer dan teknologi seperti pesawat tempur dan nuklir. Israel juga memiliki keunggulan lainnya di bidang teknologi seperti pengelolaan irigasi dan air. Kelangkaan air menjadi salah satu masalah yang dialami oleh beberapa negara teluk terutama seperti Bahrain yang berada di wilayah teluk persia. Beberapa perusahaan negara teluk seperti NSO Group dan Verint Sytem berkantor pusat di tepi pantai Israel. Israel juga sering melakukan perdagangan hasil alam mereka seperti tomat dan ceri dengan negara-negara teluk.

Selain akan mendapat bantuan militer dari Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel juga akan mempererat hubungan antara Bahrain dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Amerika Serikat merupakan negara

pertama yang mengakui kemerdekaan Israel di tahun 1948 dan mengakui bahwa Jerusalem merupakan ibu kota Israel pada tahun 2017. Amerika dan Israel merupakan dua negara sahabat yang sama-sama berkomitmen untuk memajukan kemakmuran ekonomi dan keamanan regional. Amerika Serikat telah banyak membantu Israel dalam mempertahankan keamanan regionalnya termasuk dengan memberikan latihan militer dan pengembangan senjata. Bahrain yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel secara otomatis juga akan mendapat banyak dukungan dari Amerika. Membuka kerjasama dengan Israel secara tidak langsung adalah sarana untuk memperkuat poros kerjasama Manama dan Washington. Namun Bahrain juga perlu waspada dengan peranan Amerika Serikat di Timur Tengah dalam jangka panjang. Dikhawatirkan di masa depan nanti peranan Amerika akan banyak mempengaruhi dan mengintervensi urusan regional negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi mempertahankan Amerika Serikat sebagai mitra untuk menopang keamanan kawasan tetap menjadi prioritas penting (Rahman 2021).

Amerika Serikat telah banyak memfasilitasi persenjataan Bahrain untuk memperkuat pertahanan keamanan mereka. Hubungan baik antara Bahrain dan Amerika yang sudah terbentuk sejak lama membuat normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain dan Israel menjadi semakin lancar. Meskipun dalam perang antara Palestina dan Israel Bahrain berada di pihak Palestina dan mendukung penuh Palestina untuk segera mendapatkan kemerdekaannya, namun kehadiran Amerika yang juga sekutu Israel di Timur tengah sedikit banyaknya membuat normalisasi ini berjalan lancar. Amerika berperan penting dalam terciptanya hubungan diplomatik antara negara-negara Timur Tengah dan Israel, Peran Amerika disini

yaitu untuk memberikan dukungan kepada dua negara untuk membantu perdamaian dunia, menjadi mediator dalam proses normalisasi dan mengakomodir kepentingan masing-masing negara. Keterlibatan Amerika dalam proses normalisasi ini bukan tanpa sebab, Amerika memiliki kepentingan sendiri di Timur Tengah. Salah satu kepentingannya adalah untuk menjalankan kebijakan politik luar negeri mereka. Kebijakan Amerika di Timur Tengah bertujuan untuk mengontrol sumber energi minyak bumi dimana kawasan hampir 61% cadangan minyak bumi dunia berada di kawasan Timur Tengah. Selain kepentingan ekonomi, Amerika juga memiliki peran yang strategis di Timur Tengah yaitu menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan (Ramadhan Reza Bachtiar 2019, 221).

Saat pertama kali Israel mengunjungi Bahrain untuk membahas kelanjutan dari normalisasi yang telah mereka lakukan, Menteri keuangan AS Steven Munchin ikut ke Bahrain untuk mendampingi Delegasi Israel. Pertemuan tersebut membahas hubungan ekonomi dan perdagangan, perbankan dan jasa keuangan, kerjasama kementerian luar negeri dan beberapa bidang lainnya. Setelah pertemuan antara menlu Bahrain dan Israel selesai, mereka melakukan tur ke markas angkatan laut AS untuk menandakan tujuan bersama melawan Iran. Saat mengunjungi markas angkatan laut AS, menteri luar negeri Israel mengatakan "3 negara kami bekerja sama karena kami memiliki kepentingan yang sama di kawasan itu". Hal ini merupakan sebuah pernyataan bahwa ketiga negara tersebut sama-sama ingin melawan Iran. Bahrain menganggap bahwa Iran telah banyak mengintervensi urusan negara mereka dan melakukan kerusuhan di Bahrain termasuk saat pemberontakan yang dilakukan oleh muslim syiah tahun 2011 (Williams, Heller 2021). Utusan AS untuk Timur Tengah Avi Berkowitz mengatakan bahwa Bahrain

dan Israel sepakat untuk memajukan sektor pariwisata, perbankan serta hubungan diplomatik (VOA 2021).

Sebelum Bahrain, beberapa negara Timur Tengah lainnya terlebih dahulu telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel seperti Mesir di tahun 1979, Yordania di tahun 1994, dan UEA pada tahun 2020. Beberapa negara yang telah melakukan normalisasi Israel telah banyak mendapat bantuan dari Amerika yang merupakan mitra utama Israel contohnya seperti Mesir dan Sudan. Setelah membuka kerjasama dengan Israel, Mesir menjadi negara kedua yang menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Contoh lainnya adalah Sudan yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tanggal 23 Oktober. Sebagai mitra Israel, Amerika Serikat melalui presiden Donald Trump mencabut Sudan dari daftar negara-negara yang mendukung terorisme (CNN Indonesia 2020c). Dibukanya normalisasi antara beberapa negara-negara GCC dengan Israel merupakan terobosan baru yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pilihan negara-negara tersebut membuka kerjasama dengan Israel bukan tanpa alasan. Ketika mereka memusuhi Israel mereka tidak akan mendapat bantuan militer dari Amerika dan tidak dipandang oleh kalangan politik Amerika. Bahkan akan menghalangi perolehan senjata militer dan teknologi yang diberikan Amerika bagi kawasan tersebut. Dengan adanya dukungan militer dari Amerika dan Israel kepada Bahrain untuk memperkuat keamanan militer dalam menghalau ancaman Iran.

3.1.3 Konteks Internasional

Konteks Internasional yang dijelaskan oleh William D.Coplin dalam bukunya adalah bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi yang ada, akan menentukan bagaimana negara itu bertindak

(Coplin 1992, 164). Dengan begitu pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Bahrain untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam konteks internasional, menurut penulis hubungan antara Bahrain dan Iran merupakan faktor yang mendorong Bahrain melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dimana ancaman-ancaman dan klaim kedaulatan yang dilakukan oleh Iran kepada Bahrain mendorong Bahrain untuk membuka normalisasi dengan Israel.

Sebelumnya telah dibahas bahwa sejak pemerintahan Shah, dalam proses perluasan wilayah dan kekuasaan, Iran beberapa kali menganggap bahwa Bahrain merupakan bagian dari wilayahnya . Saat kekuasaan Inggris di Bahrain berakhir, Iran mencoba mengisi kekosongan di Bahrain dalam upaya perluasan wilayah Iran. Pimpinan Iran saat itu Shah Iran mengklaim bahwa Bahrain merupakan bagian dari wilayahnya dan Bahrain harus mengembalikannya ke Iran. Pengakuan kedaulatan yang dilakukan oleh Iran berlanjut saat dibawah kepemimpinan Khomeini melalui revolusi Iran. Khomeini menerapkan slogan-slogan persaudaraan Arab dan islam dalam upaya perluasan Iran. Slogan-slogan tersebut merupakan tipu daya Khomeini agar bisa masuk ke dalam internal Bahrain (Menafn 2018). Pada tahun 1981 dan 1996 Bahrain menuduh Iran mencoba melakukan kudeta terhadap wilayah Bahrain. Percobaan kudeta ini dilakukan oleh kelompok Syiah Bahrain yang Pro terhadap Iran. Kemudian Bahrain juga menentang pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran di kawasan Timur Tengah. Para pemimpin Bahrain mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima keputusan Iran untuk mengembangkan nuklir sebagai senjata mereka dan menyatakan bahwa tidak akan hidup bersama di wilayah Timur Tengah (Katzman 2020).

Saat Bahrain dan Israel secara resmi telah membuka normalisasi hubungan diplomatik, Syaikh Rasyid bin Abdullah mengatakan "Normalisasi antara Bahrain dan Israel bukan merupakan pengkhianatan terhadap Palestina namun memperkuat pertahanan kerajaan dari ancaman Iran serta stabilitas ekonomi Bahrain. Langkah yang dilakukan oleh Bahrain sangatlah tepat yaitu dengan menghalau ancaman Iran bukan menunggu serangan nyata" (Haryono, 2020). Perkataan Syaikh Rasyid tersebut memperkuat argumen bahwa adanya ancaman dari Iran yang mendorong pemerintah Bahrain untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Ketegangan antara Bahrain dan Iran sepertinya tidak pernah surut melihat dari sejarah panjang, perang dan pengaruh yang terjadi di masa lampau terutama saat terjadinya revolusi-revolusi yang dilakukan oleh Iran. Pada tahun 2007 surat kabar Iran, Hossein Shariatmadari menulis sebuah pernyataan yang berisi “Bahrain merupakan bagian dari wilayah Iran, Iran dan Bahrain dipisahkan oleh sebuah peristiwa Shahilet”. Menurut Hossein tanah yang terpisah dari Iran harus dikembalikan ke tanah air Iran dan untuk mengakui bahwa Bahrain adalah suatu bangsa, tanah bangsa ini harus dianeksasi ke negara lain (Rimawi, 2015). Bahrain sangat waspada terhadap sikap-sikap yang dilakukan oleh Iran seperti dalam proyek pengembangan nuklir yang dilakukannya. Untuk mencapai segala kepentingannya dan menjadi negara Timur Tengah yang memiliki keunggulan dalam bidang militer, Iran mengembangkan kemampuannya tersebut dengan menggunakan keahlian sendiri dan bantuan asing. Tujuan Iran mengembangkan tenaga nuklir yang dimilikinya adalah untuk memperoleh keuntungan politik di tingkat regional dan global. Proyek pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran tentu sangat membahayakan stabilitas keamanan di Timur Tengah.

3.2 Peran Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Bahrain

Dalam normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel adanya pengaruh dari policy influencer yaitu pihak *"bureaucratic influencer"* yang mendorong pemerintahan Bahrain untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Penulis melihat bahwa dari keempat tipe Policy Influencer yang cocok dengan peristiwa normalisasi Bahrain dan Israel adalah bureaucratic influencer. Melihat dari 2 tipe lainnya yaitu *partisan influencer,* dan *mass influencer* adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Sedangkan dalam kebijakan normalisasi Bahrain dan Israel, mayoritas masyarakat Bahrain sendiri tidak setuju dengan normalisasi ini. Dalam sosial media mereka bahkan menolak normalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Bahrain ini. Bureaucratic Influencer yang dijelaskan oleh William D. Coplin adalah pihak-pihak yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan. Dalam hal ini birokrat yang memberikan pengaruh kepada pemerintahan adalah kementrian negara Bahrain. Policy Influencer atau kementrian Bahrain merupakan aktor yang paling jelas, yang dapat memberikan wewenang kepada perwakilannya untuk mengambil sebuah kebijakan.

Sebagai seorang pemimpin di negara Bahrain, Raja Hammad merupakan salah satu aktor yang sangat berperan dalam proses normalisasi Bahrain dan Israel. Syaikh Hammad merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara Bahrain yang mana setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Bahrain, diputuskan dan dipertimbangkan oleh Syaikh Hammad. Dengan adanya ancaman yang datang dari Iran, tentu pemerintahan Bahrain tidak ingin terjadi kekacauan di negara Bahrain apalagi kehilangan wilayah kedaulatannya diakuisisi oleh negara asing. Maka

sebagai pembuat keputusan di negara Bahrain, pemerintah Bahrain mengambil langkah untuk menghindari ancaman dan klaim kedaulatan dari Iran dengan cara membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai pemegang kekuasaan di pemerintahan Bahrain, Raja Hammad bertanggung jawab untuk menangani seluruh ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara Bahrain termasuk ancaman dari Iran. Namun meskipun Raja sebagai aktor tunggal yang memiliki wewenang untuk mengambil sebuah kebijakan, perdana menteri yang ada di sekelilingnya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap sebuah kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Raja.

Dalam hal ini *Bureaucratic Influencer* adalah tipe yang tepat untuk menganalisis kebijakan normalisasi hubungan diplomatik Bahrain dan Israel. Perdana menteri seperti menteri luar negeri dan dalam negeri Bahrain merupakan birokrat yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri Raja Hammad. Abdul Latif Al-Zayani merupakan perwakilan kementerian luar negeri Bahrain yang datang ke Gedung Putih untuk mewakili Bahrain dalam menyepakati normalisasi bersama perwakilan Israel, Benyamin Netanyahu. Kemudian menteri dalam negeri Bahrain, Syaikh Rasyid Al-Khalifa berperan sebagai aktor yang bertugas untuk meyakinkan kepada masyarakat Bahrain bahwa normalisasi ini dilakukan agar dapat menjaga stabilitas keamanan Bahrain dan menghindari ancaman Iran. Pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh birokrat kepada raja dalam hal ini adalah berupa pernyataan-pernyataan mereka terkait alasan Bahrain dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Para birokrat meyakinkan Raja Hammad bahawa adanya ancaman dan klaim kedaulatan dari Iran sehingga Bahrain perlu mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Selain itu para

birokrat juga menekankan bahwa normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain bukan sebuah pengkhianatan kepada Palestina, melainkan untuk menciptakan perdamaian di kawasan khususnya mengakhiri konflik Palestina dan Israel.

Raja Hammad menegaskan bahwa normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain adalah untuk menghalau ancaman yang datang dari Iran. Saat pertemuan Dewan Keamanan negara-negara Teluk ke 135 yang diadakan di Kota Riyadh, Raja Hammad memberikan skema rinci yang dilakukan negaranya untuk menghadapi tindakan kriminal yang membahayakan dan mengancam keamanan dan kerajaan Bahrain. Dewan juga mengecam pernyataan pemimpin revolusi Islam Iran terkait sikapnya terhadap Iran. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selama ini Iran selalu mengklaim dan menganggap bahwa Bahrain merupakan bagian dari wilayahnya (Ministry of Foreign Affairs 2015). Ancaman dan pengakuan kedaulatan yang datang dari Iran dalam proses sekuritisasi normalasisasi Bahrain dan Israel merupakan sebuah existential threat bagi Bahrain.

Tabel 1.2 Pernyataan Policy Influencer

No	Policy Influencer	Tanggal	Pernyataan	Media Publikasi
1	Raja Hammad bin Isa Al-Khalifa	21-Sep-20	“Penandatanganan deklarasi ini merupakan langkah bersejarah untuk mencapai perdamaian komprehensif di Timur Tengah, mewujudkan aspirasi rakyat untuk keamanan, stabilitas, kemakmuran dan pengembangan agama mereka”	(Bahrain News Agency 2020a)
2	Dr Abdullatif bin Rashid Al-Zayani	30-Sep-20	"Kunjungan menteri luar negeri negara israel ke kerajaan bahrain dibangun di atas kemajuan besar yang telah kami buat selama waktu itu, dan menegaskan kembali keinginan bersama kami untuk	(Bahrain News Agency 2020)

			menyebarkan perdamaian, stabilitas dan kerja sama di seluruh timur tengah dan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran nyata dan abadi bagi semua rakyatnya,"	
3	Dr Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani	15-Sep-20	"Kerajaan Bahrain memperbaharui komitmennya pada prinsip bertetangga yang baik dengan semua negara tetangga tanpa terkecuali untuk masa depan teluk dan Timur Tengah yang stabil"	(Bahrain News Agency 2020b)
4	Syaikh Rasyid bin Abdullah Al-Khalifa	15-Sep-20	"Normalisasi antara Bahrain dan Israel bukan merupakan pengkhianatan terhadap Palestina namun memperkuat pertahanan kerajaan dari ancaman Iran serta stabilitas ekonomi Bahrain. Langkah yang dilakukan oleh Bahrain sangatlah tepat yaitu dengan menghalau ancaman Iran bukan menunggu serangan nyata"	Medcom.id (Haryono 2020)

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Raja Bahrain yaitu yang mulia raja Hammad bin Isa Al-Khalifa dan menteri dalam negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid, terkait adanya ancaman dari Iran yang telah lama mengklaim kedaulatan wilayah Bahrain adalah sebuah pernyataan dari birokrat pemerintahan. Pernyataan yang dikeluarkan oleh birokrat tersebut bertujuan untuk meyakinkan kepada publik khususnya masyarakat Bahrain bahwa disepakatinya normalisasi antara Bahrain dan Israel adalah sebuah langkah strategis yang dihadapi oleh Bahrain untuk menghalau ancaman dari Iran. Hal ini tidak terlepas dari adanya protes dari masyarakat Bahrain yang menganggap bahwa normalisasi ini merupakan sebuah pengkhianatan besar bagi perjuangan Palestina.

Kebijakan pemerintahan Bahrain yang membuka normalisasi dengan Israel tidak didukung sepenuhnya oleh warga, tokoh dan kelompok di Bahrain. Penolakan

dari masyarakat Bahrain contohnya disampaikan oleh Ayatollah Sheikh Isa Qosim yang menyatakan bahwa normalisasi Bahrain dan Israel sangat bertentangan dengan keinginan rakyat Bahrain. Ia menegaskan bahwa rakyat Bahrain harus melawan keputusan yang diambil oleh syaikh Hammad tersebut. Penolakan terkait normalisasi Bahrain dan Israel juga disampaikan oleh kelompok asosiasi politik Bahrain yang menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak sejalan dengan generasi Bahrain yang telah setia dengan perjuangan rakyat Palestina (Ayu 2020). Bahrain memiliki sejarah yang panjang terkait dukungannya terhadap Palestina dibanding UEA yang juga telah menandatangani normalisasi dengan Israel. Setiap konflik Palestina-Israel memuncak, rakyat Bahrain selalu menyerukan dukungan terhadap Palestina. Ketika Donald Trump mengadakan deklarasi untuk perdamaian di Timur Tengah dalam upaya *"Trump plan for Peace"* yang digelar di Manama, rakyat Bahrain memandang pemerintah Bahrain telah mengabaikan perjuangan Palestina.

Meskipun dalam pernyataannya tidak secara langsung menyinggung tentang masalah Iran, namun beberapa perkataan raja Hammad tersebut bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan terciptanya normalisasi antara Bahrain dengan Israel tidak akan sedikitpun mengurangi dukungan Bahrain terhadap perjuangan Palestina. Saat berpidato di majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa Raja Hammad mengatakan bahwa normalisasi Bahrain dan Israel sebagai upaya intensif untuk mengatasi konflik Palestina-Israel sesuai dengan solusi dua negara. Syaikh Hammad menjelaskan bahwa solusi dua negara ini merupakan titik dasar untuk perdamaian yang adil dan komprehensif pada pembentukan negara Palestina merdeka dan Yerusalem sebagai Ibu kotanya. Kerajaan Bahrain menegaskan perlunya resolusi legitimasi internasional dan

inisiatif perdamaian arab untuk membangun jembatan baru dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina (Ahren 2020). Terlepas dari adanya protes dari rakyat Bahrain yang menganggap normalisasi ini sebagai pengkhianatan terhadap Palestina. Pemerintah Bahrain sebagai aktor sekuritisasi menganggap normalisasi dilakukan untuk menghindari ancaman dari Iran dan tidak akan mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Bahrain menganggap negara yahudi ini sebagai mitra yang harus didekati oleh Manama. Mengingat kedekatan Israel dengan Amerika akan meningkatkan reputasi rezim manama.

Selanjutnya syaikh Hammad bin Isa menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh Bahrain dan UEA terkait normaliasi dengan Israel bertujuan untuk menghidupkan kembali perdamaian sebagai harapan untuk meningkatkan peluang perdamaian dan mengurangi intensitas ketegangan. Normalisasi dilakukan untuk membangun dan mengembangkan kepentingan bersama serta sebagai jaminan untuk masa depan yang baik kawasan ini. Melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel, raja Hammad menekankan pentingnya memperkuat perdamaian dan keamanan internasional dan melanjutkan upaya dalam mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran (Bahrain News Agency 2020).

3.3 Respon terhadap Normalisasi Bahrain dan Israel

3.3.1 Respon Domestik/Regional Bahrain

Dibukanya normalisasi hubungan diplomatik dan Israel mendapat banyak reaksi dari dunia internasional dan masyarakat Bahrain sebagai publik/audience. Pada bagian ini penulis akan menguraikan bagaimana respon audience dalam melihat terjadinya normalisasi antara Bahrain dan Israel. Berbagai reaksi datang dari lingkup regional Bahrain sendiri dan juga lingkup dunia internasional terkait

dibukanya hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel. Untuk melihat bahwa audience telah yakin terhadap ancaman yang datang dari Iran dan merupakan isu penting yang masuk kedalam agenda nasional, perlu melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap normalisasi ini. Masyarakat Bahrain dan dunia internasional yang menyetujui keputusan Bahrain untuk membuka kerjasama dengan Israel, merupakan audience yang telah menyadari bahwa normalisasi ini dilakukan untuk menghalau ancaman Iran. Kelompok yang setuju dengan normalisasi ini sebagian besar adalah kelompok sunni Bahrain yang selama ini selalu mendukung pemerintahan Raja Hammad. Mereka juga sepakat bahwa langkah tersebut merupakan terobosan baru dalam rangka menciptakan perdamaian di Timur Tengah serta sebagai jalan untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Sedangkan publik yang mengecam normalisasi antara Bahrain dan Israel adalah mereka-mereka pendukung Palestina yang menganggap normalisasi Bahrain dan Israel akan menghambat perjuangan Palestina. Menurut jejak pendapat yang disampaikan saluran TV Israel, masyarakat Bahrain yang setuju terhadap normalisasi dengan Israel kurang dari 20% (عربي بوست 2021).

Dilansir dari berita Middle East Eye, keputusan Bahrain membuka normalisasi dengan Israel ternyata banyak masyarakat Bahrain yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Di media sosial masyarakat Bahrain menyuarakan hastag “Bahrain against normalisation” sebagai bentuk penolakan mereka terhadap keputusan raja Hammad. Beberapa kelompok di Bahrain yang tidak setuju dengan normalisasi Bahrain dan Israel diantaranya adalah putri aktivis hak asasi manusia Bahrain, Maryam Al-Khawaja mengatakan mayoritas penduduk Bahrain selalu menentang penindasan, pendudukan terhadap Palestina (MEE and Agency 2020).

Pemimpin Syiah Bahrain, Sheikh Isa Qassim mengatakan Bahrain adalah monarki teluk, keputusannya paling bertentangan dengan rakyatnya sendiri. Qasim menolak normalisasi dengan Israel dan menuntut warga Bahrain untuk melakukan demo terhadap pemerintahan Bahrain. Kritik juga disampaikan oleh kelompok oposisi Al-Wefaq yang menyebut bahwa perjanjian antara rezim bahrain dan penduduk zionis adalah pengkhianatan total terhadap Islam dan Arabisme. Dari beberapa respon yang diberikan oleh masyarakat Bahrain hampir semua golongan masyarakat menolak normalisasi antara Bahrain dan Israel. Mereka menganggap bahwa hal ini dianggap telah mengkhianati perjuangan masyarakat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

Namun menurut Rashid bin Abdullah Al-khalifa normalisasi dengan Israel dilakukan untuk menjalin hubungan diplomatik demi melindungi kepentingan yang lebih tinggi dari negara Bahrain dan melindungi entitas negara (Firmansyah 2020). Pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri Bahrain tersebut untuk meyakinkan publik bahwa tujuan normalisasi ini agar mendapatkan kepentingan negara Bahrain.

3.3.2 Respon Internasional

Respon Palestina

Sebagai musuh Israel di Timur Tengah Palestina mengutuk keras perjanjian tersebut sebagai tikaman yang dilakukan negara arab terhadap Palestina. Warga Palestina di Gaza membakar foto para pemimpin Israel, Bahrain, Amerika dan UEA sebagai bentuk protes dan penolakan mereka terhadap perjanjian tersebut. Demo yang terjadi di Gaza tersebut dipelopori oleh organisasi hamas melalui pejabatnya Maher Al-Holy. Al-Holy mengatakan kita harus memerangi virus normalisasi dan

memblokir semua jalurnya sebelum berhasil mencegah penyebarannya. Sekretaris jenderal *Palestina Organization Liberation* (PLO), Saeb Erekat menyebutkan bahwa dorongan diplomatik tidak akan tidak akan mencapai perdamaian jika konflik Palestina-Israel tidak diselesaikan terlebih dahulu. Perkataan Saeb tersebut seakan-akan membantah pernyataan dari pemerintah Bahrain bahwa normalisasi ini dapat memberikan jalan damai untuk Palestina (Al-Jazeera 2020a). Palestina menganggap bahwa perjanjian ini telah merusak pondasi penting dari strategi Palestina yang selama ini mengandalkan solidaritas negara-negara arab untuk menghadapi konflik dengan Israel.

Respon Iran

Respon terhadap kebijakan pemerintah Bahrain juga datang dari dunia internasional. Presiden Iran, Hassan Rouhani memperingatkan Bahrain dan UEA dampak normalisasi dengan Israel terhadap keamanan di kawasan Timur Tengah. Penasihat presiden Iran menyebut bahwa langkah tersebut merupakan pintu bagi zionisme untuk dapat menduduki negara-negara teluk dengan cara modern. Kementerian Luar negeri Iran mengatakan keputusan Bahrain adalah hal yang memalukan, dia menambahkan penguasa Bahrain sudah terlibat dengan kejahatan rezim zionis dan merupakan ancaman bagi keamanan kawasan (BBC News 2020c). Penolakan terhadap normalisasi Bahrain dan Israel juga dilontarkan oleh Turki, Kementerian luar negeri Turki mengatakan bahwa hati nurani masyarakat di kawasan itu tidak akan memaafkan perilaku munafik untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Turki juga meminta kepada Bahrain dan UEA untuk membatalkan rencana perdamaian arab yang telah disusun pada tahun 2002.

Sementara Mesir, Yordania dan UEA mendukung keputusan Bahrain untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi melalui cuitan twitter nya mengatakan kesepakatan tersebut akan membantu membangun stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. UEA yang telah terlebih dahulu melakukan normalisasi dengan Israel menyambut keputusan Bahrain tersebut dan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah tersebut merupakan langkah yang signifikan untuk menuju era kemakmuran dan keamanan (Christiyaningsih 2020). Saat Dewan keamanan PBB melakukan pertemuan pada tahun 2020, anggota dewan perwakilan negara-negara diminta untuk memberikan tanggapan tentang Abraham Accord (Security Council 2020). Beberapa negara yang menanggapi normalisasi Bahrain dan israel diantaranya adalah :

1. Inggris

   Delagasi dari Inggris meminta agar negara-negara lain di Timur Tengah mengikuti langkah yang telah diambil oleh Bahrain dan UEA untuk normalisasi dengan Israel. Menurutnya komunitas internasional harus membangun momentum ini untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Ia juga meminta agar Palestina dan Israel melanjutkan dialog mereka untuk menemukan titik temu konflik antara keduanya.

2. Amerika Serikat

   Melalui Rodney Hunter, dia menekankan bahwa kesepakatan abraham merupakan langkah paling penting demi mencapai perdamaian di Timur Tengah. Mengingat konflik yang terjadi di Timur Tengah telah berlangsung selama bertahun-tahun. Rodney meminta agar pemimpin Palestina dapat menerima kesepakatan tersebut. Dia menambahkan bahwa negaranya telah

menyusun rencana perdamaian di Timur Tengah yang lebih sebagai batu loncatan untuk memecahkan kebuntunan konflik di Timur Tengah

3. China

   Cina menekankan negara-negara yang memiliki pengaruh untuk menegakan tujuan dari kesepakatan abraham yaitu memajukan proses perdamaian. Delegasi China juga mengingatkan bahwa rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki Palestina jika tetap dilakukan akan melanggar resolusi PBB dan merusak prospek dua negara. Maka dari itu ia menyerukan Israel untuk mencabut blokade di Gaza.

4. Indonesia

   Delegasi Indonesia, mengatakan perdamaian tanpa mengatasi akar masalahnya bukanlah perdamaian sama sekali. Menurutnya akar penyebab konflik Palestina-Israel adalah pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel. Dian Triansyah menekankan Dewan keamanan PBB harus mendukung seruan Sekretaris Jenderal kepada para pemimpin Israel dan Palestina. Dia juga meminta Israel untuk mengakhiri blokade Gaza dan mengizinkan akses untuk bantuan kemanusiaan.

5. Rusia

   Federasi Rusia menekankan bahwa semua masalah harus diselesaikan oleh para pihak sendiri melalui negosiasi secepat mungkin. Rusia meminta kepada negara-negara lain untuk tidak melakukan provokasi secara sepihak termasuk dengan cara serangan teroris. Dia mengatakan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan situasi di jalur gaza adalah pendudukan Palestina.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel secara resmi diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 11 September 2020. Perjanjian kesepakatan antara Bahrain dan Israel tertuang dalam dokumen kesepakatan yaitu *Abraham Accord*. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh William D.Coplin dalam Decision Making Theory terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Kondisi Domestik Bahrain, Sejak diangkat menjadi pemimpin di negara Bahrain, Raja Hammad banyak diprotes oleh masyarakat Bahrain karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehnya dianggap banyak membatasi suara masyarakat untuk ikut dalam politik negara. Kemudian puncaknya pada tahun 2011 terjadi peristiwa Arab Spring/protes musim semi di Bahrain, saat itu terjadi protes dan demo besar-besaran di manama yang menuntut Raja Hammad agar turun dari kursi pemerintahan. Bahrain tidak pernah terlepas dari konflik internal, anggota militer Bahrain ditugaskan untuk menjaga dan membubarkan para pendemo. Untuk memperkuat sektor militer, Bahrain memberikan fasilitas kepada anggota militer untuk belajar di beberapa universitas militer yang ada di dunia. Melihat dari kondisi negara Bahrain yang tidak pernah terlepas dari konflik, upaya normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain dengan Israel sangatlah tepat. Dimana salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di kawasan dan mengakhiri segala konflik dengan cara damai.

Kondisi Militer Bahrain, Bahrain merupakan negara kecil yang perekonomiannya sangat bergantung kepada sektor minyak, hampir 75% pemasukan negara berasal dari sektor minyak. Dalam sektor militer, angkatan militer Bahrain dianggap tidak mampu untuk merawat persenjataan modern dan tentara militernya dianggap tidak mampu menjalankan misi militernya untuk menjaga perbatasan-perbatasan. Dalam rangka memperkuat sektor keamanan negara, kebijakan Bahrain untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel merupakan keputusan yang tepat. Yang mana di kawasan Timur Tengah Israel merupakan salah satu negara yang memiliki keunggulan dalam sektor teknologi dan militer. Dengan dibukanya normalisasi ini, diharapkan Bahrain mendapatkan bantuan pelatihan militer dan persenjataan dari Israel. Apalagi Israel merupakan sahabat dekat Amerika Serikat yang juga telah banyak membantu persenjataan militer Bahrain.

Konteks Internasional, Hubungan antar negara dan sistem internasional sangat mempengaruhi sikap negara dalam mengambil kebijakan luar negeri mereka. Hubungan Bahrain dan Iran dalam hal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Bahrain untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Iran telah lama mengklaim bahwa Bahrain merupakan bagian dari wilayahnya dan Bahrain harus mengembalikannya kepada Iran. Iran juga telah banyak memberikan ancaman kepada Bahrain salah satunya adalah dengan melakukan aksi terorisme. Dengan adanya ancaman tersebut, kebijakan Bahrain untuk melakukan normalisasi dengan Israel dipengaruhi dengan konteks ini. Maka untuk memperkuat keamanan dari berbagai ancaman khususnya dari Iran, dalam rangka mempertahankan tanah air dan kedaulatan negara Bahrain, normalisasi dengan Israel sangat diperlukan oleh

Bahrain. Karena Israel juga merupakan musuh Iran di Timur Tengah. Selain itu Amerika Serikat juga merupakan negara yang memperebutkan kekuasaannya di Timur Tengah dengan Iran.

Selain itu adanya pengaruh yang diberikan oleh Bureaucratic Influencer yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Bahrain. Birokrat yang berperan dalam perjanjian ini adalah kementerian Bahrain. Mereka mempengaruhi Raja Hammad melalui pernyataan-pernyataannya yang menekankan bahwa ancaman dari Iran benar adanya. Serta perlunya sebuah tindakan untuk menghindari ancaman tersebut yaitu dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan-pernyataan dari birokrat pemerintahan mendorong pemegang kekuasaan untuk akhirnya melakukan normalisasi dengan Israel.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan dalam penelitian ini, Pertama penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Menurut penulis ada beberapa kekurangan dan celah yang ada dalam penelitian ini diantaranya, belum adanya penjelasan tentang bagaimana hubungan Bahrain dan Israel pasca kemerdekaan Bahrain. Dengan begitu, maka sebuah proses perdamaian yang dinamakan normalisasi akan terlihat lebih jelas. Kemudian penulis juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mencari pernyataan dari pemerintahan Bahrain bahwa Iran merupakan ancaman bagi kedaulatan negara Bahrain. Karena akan lebih memperjelas bahwa normalisasi yang dilakukan oleh Bahrain benar-benar untuk menghadapi ancaman Iran. Lalu peneliti

merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mencari data tentang bagaimana hubungan Bahrain dan Israel pada masa setelah penjajahan di Bahrain.

Kemudian peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Bahrain dan Israel agar benar-benar menjalankan semua kesepakatan yang ada dalam perjanjian Abraham Accord termasuk mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel melalui solusi dua negara. Karena sebagaimana komentar publik yang tidak setuju dengan normalisasi ini, mereka mengatakan bahwa normalisasi ini akan semakin mempersulit Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Maka sebagai negara arab, Bahrain harus mampu menjalankan isi perjanjian abraham yaitu pentingnya menjaga dan memperkuat perdamaian di Timur Tengah. Dengan begitu publik akan mengetahui bahwa salah satu tujuan normalisasi antara Bahrain dan Israel untuk mengakhiri konflik antara Palestina dan israel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 2021. "Masyarakat Sipil Dan Gerakan Politik: Studi Kasus Reformasi Bahrain." *Jurnal Tranfomasi Global* 8 (1): 87.

Abu Amer, Adnan. 2020. "Is the Normalisation Deal Really a Win for Israel?" 14 Oktober. 2020. https://www.aljazeera.com/opinions/2020/10/14/is-the-normalisation-deal-really-a-win-for-israel.

Ahren, Rapael. 2020. "ملك البحرين يدعو إلى 'تكثيف الجهود' لتنفيذ حل الدولتين." Time of Israel. 2020. https://ar.timesofisrael.com/ملك-البحرين-يدعو-إلى-تكثيف-الجهود-ل/.

Al-Jazeera. 2020a. "Palestinians Rally against Bahrain-Israel Normalisation." Al-Jazeera. 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/9/12/palestinians-rally-against-bahrain-israel-normalisation.

———. 2020b. "التطبيع البحريني الإسرائيلي.. من السرية إلى العلن." 11 September. 2020. https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/12/التطبيع-البحريني-الإسرائيلي-من.

———. 2021. "Israel Foreign Minister in Bahrain for Landmark Visit." Al Jazeera. 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/9/30/israel-official-visit-bahrain-normalisation.

Al-majied, Osama. 2021. "النهج البليغ للسياسة الخارجية لمملكة البحرين." Albiladpress. 2021. https://albiladpress-com.translate.goog/news/2021/4654/columns/715352.html?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc.

Al-Mursyid, Abbas. 2013. "المؤسسة العسكرية البحرينية عقيدة الإقصاء والزبائنية." *Bahrain Centre for Studies in London* 1. http://bcsl.org.uk/ar/2013/06/14/المؤسسة-العسكرية-البحرينية-عقيدة-الإ/.

AL-Thani, Dr Khalid bin Thani. 2017. "البحرين وإسرائيل.. تاريخ من العلاقات المشبوهة." Al-Sharq. 2017.

Aswar, Hasbi. 2018. "The U.S. Foreign Policy under Trump Administration to Recognize Jerusalem as the State Capital of Israel." *Nation State, Journal of International* 1 (2): 133.

Ayu, Tussie. 2020. "Masyarakat Bahrain Serukan Protes Terkait Normalisasi Hubungan Bahrain-Israel." Kompas TV. 2020. https://www.kompas.tv/article/108459/masyarakat-bahrain-serukan-protes-terkait-normalisasi-hubungan-bahrain-israel.

Bahrain news Agency. 2022. "جلالة الملك المفدى يستقبل وزير خارجية إسرائيل." Bahrain News Agency. 2022. https://www.bna.bh/جلالةالملكالمفدىيستقبلوزيرخارجيةإسرائيل.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoJNSthNjZ8J8aQy9d0sSEY%3D.

Bahrain News Agency. 2020a. "اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد ورئيس وزراء إسرائيل." Bahrain News Agency. 2020. https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDn0T2dZ5VDBAuZ%2Bt2%2BGpuHI%3D.

———. 2020b. “ وزير الخارجية: التوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل هي خطوة تاريخية نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط وخطوة شجاعة واستثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار.” Bahrain News Agency. 2020. https://bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDgG0iSZkAx1Rsn%2B2wPFUtDk%3D.

BBC News. 2017. “Apa Yang Melatarbelakangi Perselisihan Arab Saudi Dan Iran ?” BBC News. 2017. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42036425.

———. 2020a. “Israel and Bahrain Establish Formal Diplomatic Relations.” BBC News. 2020. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54589235.

———. 2020b. “Trump Announces ‘peace Deal’ between Bahrain and Israle.” 2020. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54124996.

———. 2020c. “ التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الفعل على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين؟.” BBC News. 2020. https://www.bbc.com/arabic/54178915.

Christiyaningsih. 2020. “Turki Hingga Iran Kecam Normalisasi Bahrain-Israel.” Republika.Id. 2020. https://republika.co.id/berita/qgjhfd459/turki-hingga-iran-kecam-normalisasi-bahrainisrael.

CNN Indonesia. 2020a. “AS Dorong Arab Saudi Normalisasi Hubungan Dengan Israel.” CNN Indonesia. 2020. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201015141848-134-558776/as-dorong-arab-saudi-normalisasi-hubungan-dengan-israel.

———. 2020b. “Kronologi Normalisasi Hubungan UEA, Bahrain Dan Israel.” Kronologi Normalisasi Hubungan UEA, Bahrain Dan Israel. 2020. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916085105-120-547021/kronologi-normalisasi-hubungan-uea-bahrain-dan-israel.

———. 2020c. “Normalisasi Israel-Arab ‘Terobosan’ Hingga Pengkhianatan.” CNN Indonesia. 2020. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211145602-120-580977/normalisasi-israel-arab-terobosan-hingga-pengkhianatan.

———. 2021. “Fakta Hubungan Israel-Iran, Musuh Bebuyutan Yang Saling Ancam.” CNN Indonesia. 2021. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210128093124-120-599364/fakta-hubungan-israel-iran-musuh-bebuyutan-yang-saling-ancam.

Commission, Legislation & Legal opinion. 2021. “ ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة.” Iloc-Gov-Bh. 2021. https://lloc.gov.bh/page/ميثاق العمل الوطني.

Coplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Sinar Baru.

Dan Williams, Jeffrey Heller, Nidal Al Mughrabi and Lisa Barrington. 2021. “Top Israeli Diplomat Visits Bahrain, U.S Navy Base in Signal to Iran.” Reuters. 2021. https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-foreign-minister-flies-bahrain-will-inaugurate-embassy-2021-09-30/.

David Schultz. 2109. “American Foreign Policy in the Age of Donald Trump.”

Lithuanian Annual Strategic Review 17: 23.

Dr Muhammad bin Faris Al-Hussein. 2020. " السياسة الخارجية البحرينية.. التوازن وتحقيق المصالح." Akhbar-Al-Khaleej. 2020. http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1230122.

Firmansyah, Teguh. 2020. "Bahrain: Normalisasi Dengan Israel Lindungi Kepentingan Negara." Republika.Id. 2020. https://www.republika.co.id/berita/qgp0x8377/bahrain-normalisasi-dengan-israel-lindungi-kepentingan-nega.

Irawan, Deni. 2021. "Dinamika Keamanan Kawasan Timur Tengah Dalam Persaingan Kekuatan Iran Dan Amerika Serikat." *Dauliyah* 6 (2): 230.

Jane Koninment. 2012. "البحرين: ما وراء الجمود." 1. 1. London. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pr0612kinninmont_arabic_0 (2).pdf.

Katzman, Kenneth. 2020. "Bahrain: Unrest, Security, and U.S. Policy." 95.

Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2015. "Bahrain Selayang Pandang." Manama. https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9TZWxheWFuZyUyMFBhbmRhbmcucGRm.

Kementrian Luar Negeri Indonesia. 2020. "Bahrain." Kemlu.Go.Id. 2020. https://kemlu.go.id/manama/lc/read/bahrain/1469/etc-menu.

MEE and Agency. 2020. "'A Black Day': Bahrainis Voice Anger over Normalisation Deal with Israel." Middle East Eye. 2020. https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-anger-israel-normalisation-deal.

Menafn. 2018. "محددات ومعالم السياسة الخارجية البحرينية.. خليجيا وعربيا وعالميا." Akhbar-Al-Khaleej. 2018. A7.

Ministry of Foreign Affairs. 2015. " معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٣٥) بالرياض." Riyadh. https://www.mofa.gov.bh/DesktopModules/SiteNewsDetails/PrintNewsaspx.aspx?ItemId=5205&language=en-US.

———. 2022. "السياسة الخارجية." Ministry of Foreign Affairs. 2022. https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8775&language=ar-BH.

Muriel Asseburg and Sarah Ch Henkel. 2021. "Normalisation Adn Realignment in the Middle East." *German Insitute for International and Security Affairs* 45: 10. https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2021C45_MiddleEast.pdf.

Natalian, Ester Christine. 2018. "Bahrain Gantungkan Perbaikan Ekonomi Dari Ladang Minyak Baru." CNBC Indonesia. 2018. https://www.cnbcindonesia.com/news/20180508192910-4-14191/bahrain-gantungkan-perbaikan-ekonomi-dari-ladang-minyak-baru.

Ottaway, Marina, Nathan J. Brown, Amr Hamzawy, Karim Sadjadpour, and Paul

Salem. 2008. *The New Middle East*. 1st ed. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Radhi, Mr. Haider. 2022. "قوة دفاع البحرين.. درع الوطن وحصنه المنيع." Akhbar-Al-Khaleej. 2022. http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283834.

Rahman, Omar H. 2021. "The Emergence of GCC-Israel Relations in a Changing Middle East." *Brookings Doha Centere* 1: 3.

Ramadhan Reza Bachtiar. 2019. "Pengaruh Peningkatan Kekuatan Iran Terhadap Hegemoni Amerika Serikat Di Timur Tengah." *Jurnal Studi Keislaman* 19: 221.

Rimawi, Mahmoud. 2015. "إيران والبحرين إرثمديد-من-التوتر." Al-Aroby. 2015. https://www.alaraby.co.uk/إيران-والبحرين-إرث-مديد-من-التوتر.

Rosyid Ahmad Ar-rosyid. 2019. دور مجلس النواب البحرين فى صنع السياسة الخارجين. 1st ed. Turki: معهد البحرين للتنمية السياسية. https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/images/publication/BahrainiRepresentativesRoleinMakingForeignPolicy.pdf.

Security Council. 2020. "Normalization of Ties between Israel, Gulf Arab States Presents Opportunity for Re-Engagement in Talks, Special Coordinator Tells Security Council." https://www.un.org/press/en/2020/sc14315.doc.htm.

Shay, Dr Shaul. 2020. "Bahrain and The Terror Threat Iran." IDC Herzliya.

Sijekto. 2016. "Motivasi Negara Dewan Teluk (Arab Saudi, UEA, Dan Bahrain) Menarik Duta Besarnya Di Qatar Pada Tahun 2014." *JOM FISIP* 3 (3): 11. https://media.neliti.com/media/publications/32929-ID-motivasi-negara-dewan-teluk-arab-saudi-uea-dan-bahrain-menarik-duta-besarnya-di.pdf.

STAFF TOI. 2021. "Senior Bahraini Official Openly Meets IDF Commander Who Handles Iran." Times of Israel. 2021. https://www.timesofisrael.com/senior-bahraini-official-openly-meets-idf-commander-who-handles-iran/.

VOA. 2021. "Israel, US Send Treaty Delegation to Bahrain." VOA News. 2021. https://www.voanews.com/a/middle-east_israel-us-send-treaty-delegation-bahrain/6197277.html.

Willy Haryono. 2020. "Bahrain Sebutb Normalisasi Dengan Israel Demi Halau Iran." Medcom.Id. 2020. https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah-afrika/4bam9D0b-bahrain-sebut-normalisasi-dengan-israel-demi-halau-iran.

Yaghi, Dr Mohammad. 2020. "The Gulf States Relations with Israel and Trump's Plan for Peace."

عربي بوست. 2021. "سر إصرار البحرين على التطبيع مع إسرائيل رغم الرفض الشعبي الكبير." عربي بوست. 2021. https://arabicpost-net./تحليلات/25/10/2021/التطبيع-البحريني-مع-إسرائيل/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc.

Lampiran 1. Document Abraham Accord

ABRAHAM ACCORDS: DECLARATION OF PEACE, COOPERATION, AND CONSTRUCTIVE DIPLOMATIC AND FRIENDLY RELATIONS
Announced by the State of Israel and the Kingdom of Bahrain on 15 September 2020

His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa and Prime Minister Benjamin Netanyahu have agreed to open an era of friendship and cooperation in pursuit of a Middle East region that is stable, secure and prosperous for the benefit of all States and peoples in the region. In this spirit Prime Minister Netanyahu of Israel and Foreign Minister Mr. Abdullatif Al Zayani met in Washington today, at the invitation of President Donald J. Trump of the United States of America, to endorse the principles of the Abraham Accords and to commence a new chapter of peace. This diplomatic breakthrough was facilitated by the Abraham Accords initiative of President Donald J. Trump. It reflects the successful perseverance of the United States' efforts to promote peace and stability in the Middle East. The Kingdom of Bahrain and the State of Israel trust that this development will help lead to a future in which all peoples and all faiths can live together in the spirit of cooperation and enjoy peace and prosperity where states focus on shared interests and building a better future.

The parties discussed their shared commitment to advancing peace and security in the Middle East stressing the importance of embracing the vision of the Abraham Accords, widening the circle of peace; recognizing each State's right to sovereignty and to live in peace and security, and continuing the efforts to achieve a just, comprehensive, and enduring resolution of the Israeli- Palestinian conflict.

In their meeting, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Foreign Minister Abdullatif Al Zayani agreed to establish full diplomatic relations, to promote lasting security, to eschew threats and the use of force, as well as advance coexistence and a culture of peace. In this spirit, they have today approved a series of steps initiating this new chapter in their relations. The Kingdom of Bahrain and the State of Israel have agreed to seek agreements in the coming weeks regarding investment, tourism, direct flights, security, telecommunications, technology, energy, healthcare, culture, the environment, and other areas of mutual benefit, as well as reaching agreement on the reciprocal opening of embassies.

The Kingdom of Bahrain and the State of Israel view this moment as a historic opportunity and recognize their responsibility to pursue a more secure and prosperous future for generations to come in their respective countries and in the region.

The two countries jointly express their profound thanks and appreciation to President Donald J. Trump for his untiring efforts and unique and pragmatic approach to further the cause of peace, justice and prosperity for all the peoples of the region. In recognition of this appreciation, the two countries have asked President Donald J. Trump to sign this document as a witness to their shared resolve and as the host of their historic meeting.

Prime Minister Benjamin Netanyahu

Foreign Minister Abdullatif Al Zayani

Witnessed by
President Donald J. Trump